



BUPATI ENREKANG  
PROVINSI SULAWESI SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI ENREKANG

NOMOR : 348/KEP/VIII/2017

TENTANG  
PENGESAHAN RENCANA KERJA SEKRETARIAT DAERAH  
KABUPATEN ENREKANG TAHUN 2018

BUPATI ENREKANG,

Menimbang : a. bahwa rancangan Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Enrekang setelah dilakukan verifikasi telah sesuai dengan RKPD Kabupaten Enrekang Tahun 2018;

b. bahwa berdasarkan Pasal 154 ayat (1) Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Tahapan dan Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, Rancangan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah yang telah sesuai dengan RKPD disahkan dengan Keputusan Bupati;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822) ;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4737);
  9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan , Tatacara Penyusunan,

Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

10. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang 2008-2028 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 243);
11. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah 2013-2018 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2014 Nomor 10);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Enrekang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Sistem Perencanaan Partisipatif Pembangunan Daerah Kabupaten Enrekang (Lembaran Daerah Kabupaten Enrekang Tahun 2008 Nomor 10);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Enrekang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Enrekang Tahun 2008-2028 (Lembaran Daerah Kabupaten Enrekang Tahun 2008 Nomor 14);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Enrekang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Enrekang Tahun 2014-2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Enrekang Tahun 2014 Nomor 7);
15. Peraturan Bupati Enrekang Nomor 21 Tahun 2016 tentang Tata cara Penyusunan Pruduk Hukum Daerah,( Berita Daerah Kabupaten Enrekang Tahun 2016 Nomor 21);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Mengesahkan Rencana Kerja Sekretariat Daerah Tahun 2018 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

- KEDUA : Rencana Kerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU memuat :
1. Program dan Kegiatan;
  2. Lokasi Kegiatan;
  3. Indikator Kinerja;
  4. Kelompok Sasaran;
  5. Pagu Indikatif dan Perkiraan maju;
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Enrekang  
Pada tanggal

BUPATI ENREKANG,

MUSLIMIN BANDO

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI ENREKANG  
NOMOR :  
TENTANG PENGESAHAN RENCANA KERJA  
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN  
ENREKANG TAHUN 2018

---

---

**BAB I**

**PENDAHULUAN**

**1.1. Latar Belakang**

Penyusunan rencana kerja merupakan kunci keberhasilan dalam pencapaian tugas pokok, fungsi dan tugas Sekretariat Daerah dalam membantu Bupati menyusun kebijakan dan mengkoordinir dinas daerah, lembaga teknis daerah dalam melaksanakan tugas sesuai petunjuk peraturan perundang-undangan yang berlaku. Perencanaan kerja pemerintah diharapkan dapat menjadi pedoman dalam menyusun kebijakan yang wajar, efisien, efektif dan berkualitas sehingga dapat meningkatkan kinerja dinas daerah dan lembaga teknis daerah dalam memajukan daerah berdasarkan potensi dan peranannya.

Proses perumusan kebijakan dan koordinasi dan pengelolaan sumber daya aparatur, keuangan, prasarana dan sarana pemerintahan yang menjadi tugas pokok Sekretariat Daerah Kabupaten Enrekang dilaksanakan dengan membuat rencana kerja baik jangka panjang (20 tahun), jangka pendek (5 tahun) maupun perencanaan tahunan yang mekanisme dan proses pelaksanaannya dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 yang memberikan wewenang bagi daerah untuk menyusun program kegiatan pembangunan wilayahnya berdasarkan; visi, misi, tujuan dan sasaran, program kegiatan prioritas serta indikator kinerja yang disesuaikan dengan kemampuan dan kapasitas sumber daya Daerah. Program kegiatan yang diusulkan dan direncanakan dalam Rencana Kerja Sekretariat Daerah T.A. 2018, merupakan implementasi tahun keempat dari Rencana Strategis (RENSTRA)

Sekretariat Daerah Kab.Enrekang yang akan menjadi penentu arah dalam melaksanakan tugas menyusun kebijakan-kebijakan Pemerintahan Daerah dan dalam melakukan koordinasi dengan dinas daerah dan lembaga teknis daerah Kabupaten Enrekang .

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 mengamanatkan setiap penyelenggara pemerintahan dari Pemerintah Pusat sampai dengan Pemerintah Daerah wajib membuat Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) dan Rencana Pembangunan Tahunan atau yang disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). RKPD merupakan penjabaran dari RPJMD yang memuat prioritas pembangunan, rancangan kerangka ekonomi daerah, rencana kerja dan pendanaannya baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Sehubungan dengan hal tersebut, dalam rangka implemmentasi dan penjabaran dari Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat Daerah Tahun 2014-2018, maka perlu disusun Rencana Kerja (Renja) Sekretariat Daerah untuk tahun 2018 sebagai implementasi tahun keempat dari Renstra Sekretariat Daerah dimaksud dengan tetap mempertimbangkan hasil pencapaian kinerja pada tahun 2016. ( yang dituangkan dalam LAKIP dan LKPJ akhir tahun ). Proses penyusunan Renja Sekretariat Daerah telah melalui mekanisme musrenbang yang nantinya akan ditindaklanjuti kedalam dokumen KUA-PPAS, RKA dan RAPBD Tahun 2018.

Keterkaitan dokumen rencana kerja (Renja) Sekretariat Kabupaten Enrekang dapat dilihat sebagai berikut :

- a. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Enrekang Tahun 2008-2028, berfungsi sebagai dokumen perencanaan makro politis berwawasan dua puluh tahun dan memuat visi, misi dan arah Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah setiap lima tahun sekali;

- b. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Enrekang Tahun 2016-2018 berfungsi sebagai penjabaran dari RPJPD dan memuat visi, misi. Gambaran umum, kondisi yang diharapkan, analisis lingkungan internal dan eksternal, arah kebijakan, strategi dan indikasi sumber pembiayaan menjadi pedoman penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Rencana Strategis (Renstra) SKPD;
- c. Rencana Strategi Sekretariat Daerah Kabupaten Enrekang Menjadi pedoman penyusunan Rencana Kerja ( Renja ) Tahunan Sekretariat Daerah.

### **1.2. Landasan Hukum Penyusunan Renja Sekretariat Daerah Kabupaten Enrekang.**

Sejumlah peraturan perundangan telah digunakan sebagai dasar hukum, antara lain:

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan pembangunan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
3. Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
5. Peraturan pemerintah Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2011 tentang Pelaporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
8. Keputusan MENPAN No. KEP/35/M.PAN/3/2004 tentang Pedoman

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
- 10 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2016 tentang Pedoman penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2016;
11. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Enrekang;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Enrekang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Enrekang Tahun 2014 – 2018.
13. Keputusan Bupati Enrekang Nomor 634/KEP/XII/2014 tentang Pengesahan Rencana Strategis ( Renstra ) Sekretariat Daerah Kabupaten Enrekang Tahun 2014-2018

### **1.3. Maksud dan Tujuan Rencana Kerja (Renja)**

Secara umum maksud penyusunan Renja Sekretariat Daerah Kabupaten Enrekang adalah untuk memberikan gambaran mengenai kebijakan, program dan kegiatan beserta indikator kinerja dan pagu indikatif masing-masing program kegiatan yang akan dilaksanakan langsung oleh Sekretariat Daerah untuk satu tahun mendatang. Secara khusus rencana kerja ini mempunyai tujuan:

1. Mewujudkan terciptanya efektifitas, efesiensi, sinkronisasi dan sinergisitas dalam perumusan kebijakan Pemerintah Daerah dan koordinasi dengan Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah kedepan yang lebih terfokus guna mencapai kinerja sesuai dengan tugas dan fungsi.
2. Menjaga Kesenambungan pembangunan dan menjadikan Renja sebagai perangkat manajerial dan manajemen dalam menyusun kebijakan



Pemerintah Daerah dan dalam melakukan koordinasi dalam kurun waktu satu tahun kedepan.

3. Menyelaraskan perencanaan program kegiatan dengan pengalokasian anggaran tahunan Sekretariat Daerah.
4. Menjadi informasi dan gambaran hasil evaluasi pelaksanaan kegiatan berdasarkan fungsi serta indikator kinerja Sekretariat Daerah yang akan diwujudkan dalam pelaksanaan program tahun depan.

#### **1.4. Sistematika Penulisan**

Secara sistematika Rencana Kerja (Renja) Sekretariat Daerah Kabupaten Enrekang Tahun 2018 dapat diuraikan sebagai berikut:

---

### **BAB.I PENDAHULUAN**

#### **1.1. Latar Belakang**

*Mengemukakan pengertian singkas tentang Renja-SKPD, proses penyusunan Renja-SKPD, kedudukan Renja SKPD tahun rencana dalam periode dokumen Renstra-SKPD, keterkaitan antara dokumen Renja-SKPD dengan dokumen RPJMD, Renstra-SKPD, RKPD serta tindak lanjutnya dalam proses penyusunan RAPBD.*

#### **1.2. Landasan Hukum**

*Memberikan uraian singkas tentang dasar hukum yang digunakan dalam penyusunan Renja-SKPD baik yang berskala nasional maupun daerah.*

#### **1.3. Maksud dan Tujuan**

*Menjelaskan maksud dan tujuan penyusunan Renja-SKPD tahun rencana*

#### **1.4. Sistematika Renja-SKPD**

*Mengemukakan sistematika Renja-SKPD terkait dengan pengaturan serta penjelasan ringkasan isi dari setiap BAB.*

## **BAB.II EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA-SKPD TAHUN LALU**

### **2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Realisasi Renstra Sekretariat Daerah.**

*Diawali dengan menguraikan realisasi program/kegiatan berdasarkan urusan yang tidak memenuhi target kinerja keluaran disertai dengan faktor-faktor penyebab tidak tercapainya target kinerja, serta uraian kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut*

*Selanjutnya Dibuat rekapitulasi dalam bentuk tabel sesuai format Tabel 2.1.*

### **2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Sekretariat Daerah.**

*Pada bagian ini akan menguraikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan pada Sekretariat Daerah berdasarkan indikator kinerja yang telah ditentukan dalam SPM maupun Indikator Kinerja Kunci (IKK) sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007.*

*Selanjutnya dibuatkan rekapitulasi dalam bentuk tabel sesuai format Tabel 2.2.*

### **2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Sekretariat Daerah**

*Pada bagian ini menjelaskan tingkat capaian kinerja pelayanan Sekretariat Daerah, Permasalahan dan hambatan yang dihadapi serta peluang dan tantangan dalam meningkatkan pelayanan serta isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindak lanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan.*

## **2.4 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat**

*Dalam bagian ini menguraikan hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan, LSM, Asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun delegasi kecamatan yang langsung ditujukan kepada Sekretariat Daerah maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi dan penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang kabupaten.*

*Selanjutnya dirumuskan dalam tabel 2.5*

## **BAB. III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN**

### **3.1. Telaahan terhadap kebijakan Nasional**

*Telaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas Pembangunan Nasional yang ditindak lanjuti dengan program dan kegiatan yang mendukung demi terlaksana dan suksesnya program nasional tersebut.*

*Demikian pula dengan arah kebijak pembangunan ditingkat propinsi yang harus ditindak lanjuti dengan program dan kegiatan pembanguna ditingkat Kabupaten.*

*Selanjutnya dirumuskan dalam bentuk Tabel. 3.1*

### **3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Sekretariat Daerah**

*Memuat rumusan Tujuan dan Sasaran yang akan diwujudkan Sekretariat Daerah sesuai dengn tugas dan fungsi dikaitkan dengan target kinerja Renstra Sekretariat Daerah.*

### **3.3. Program dan Kegiatan**

*Memuat penjelasan tentang rumusan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan Sekretariat Daerah di tahun 2016 yang disertai tabel rencana Program dan dan kegiatannya.*

#### **BAB. IV PENUTUP**

Berisikan catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaan maupun ketersediaan anggaran yang tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah-kaidah pelaksanaan maupun rencana tindak lanjut untuk perbaikan dimasa yang akan datang.

## **BAB II**

### **EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA SEKRETARIAT TAHUN LALU**

#### **2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Lalu dan Capaian Renstra Sekretariat Daerah.**

Pelaksanaan Kegiatan pada Sekretariat Daerah selama lima tahun terakhir telah dilakukan berbagai aktivitas yang berdampak pada penyusunan kebijakan dan mengkoordinir Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah dalam pelaksanaan tugas sesuai petunjuk Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Perencanaan kegiatan yang baik, tepat dan ukuran merupakan faktor kunci dan awal keberhasilan dari pencapaian tujuan berdasarkan tugas pokok dan fungsi yang diemban oleh Sekretariat Daerah . Pencapaian tujuan dimaksud dapat diukur melalui keberhasilan melaksanakan program yang dicanangkan sebagai bagian dari keseluruhan proses kegiatan berdasarkan tugas dan fungsi Sekretariat Daerah dengan berpedoman pada kebijakan strategik seperti ;

1. Kebijakan publik dengan melakukan sosialisasi dan informasi secara terbuka dan partisipatif sehingga dapat memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat dan Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah dalam menyusun kebijakan Pembangunan.
2. Kebijaksanaan publik dengan melakukan pembinaan dan koordinasi yang terencana dengan Dinas dan Lembaga Teknis Daerah, dan menerapkan sistem pengendalian internal dan pengawasan melekat secara konsisten dan bertanggung jawab dalam membuat suatu kebijaksanaan berdasarkan peraturan perundang-undangan .
3. Kebijaksanaan publik dengan meningkatkan SDM aparatur melalui diklat-diklat teknis dan pendidikan sehingga personil PNS pada Sekretariat Daerah mengerti akan tugas dan fungsinya masing-masing .
4. Kebijaksanaan keuangan dengan melaksanakan penggunaan dana yang rasional dan berbasis kinerja serta tertib dalam pengelolaan Administrasi Keuangan

5. Kebijaksanaan pelayanan masyarakat atau pelanggan dengan melakukan pelayanan kepada masyarakat , Dinas dan lembaga teknis daerah yang cepat, tepat dan terampil sesuai standar pelayanan minimal karena Sekretariat Daerah merupakan sentra pelayanan administrasi pemerintahan dan kebijaksanaan dalam pembangunan dan tata pemerintahan di Kabupaten Enrekang .

Secara umum Sekretariat telah dapat melaksanakan tugas utamanya yang menjadi tanggungjawab organisasi. Dari 4 Sasaran utama yang telah ditetapkan dengan beberapa indikator yang menjadi intrumennya pengukuran pencapaian sasarnya, 3 Sasaran yang telah mencapai target sangat baik yakni rata-rata 95 – 100% dan 1 Sasaran mencapai target kategori baik dengan nilai capaian 71 %, sasaran-saran dimaksud adalah :

1. Sasaran SATU : Meningkatnya sinergitas kebijakan pemerintah pusat, provinsi, daerah, dan antar SKPD dengan kategori sangat baik : 95 %;
2. Sasaran KEDUA : Meningkatnya kualitas sumber daya aparatur dengan kategori baik : 71 %,
3. Sasaran KETIGA : Meningkatnya kualitas dan luanntitas produk hukum daerah dengan kategori sangat baik : 100 %;
4. Sasaran KEEMPAT : Meningkatnya akses teknologi dan informasi dalam pelayanan publik dengan kategori sangat baik : 100 %.

Untuk mencapai target sasaran kinerja, Sekretariat Daerah pada tahun 2016 didukung kegiatan sebanyak 99 dengan total anggaran sebesar Rp. 22.524.580.121, dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 20.778.789.055,- atau sebesar 92 %.

Secara rinci, evaluasi capaian kinerja pelaksanaan program dan kegiatan Sekretariat Daerah Tahun 2016 dan gambaran pencapaian Renstra sebagaimana tabel 2.1 berikut.

**TABEL 2.1**

**REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA DAN PENCAPAIAN RENSTRA SEKRETARIAT  
DAERAH TAHUN 2016 (TAHUN BERJALAN)**

NO	Urusan, /Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program /Kegiatan	Indikator Kinerja Program(outcome)/Kelgiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2018	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2015 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Kinerja Capaian Program dan Keluaran Kegiatan (Renja) Tahun 2017 (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Tahun berjalan (tahun n-1)		Ket
					Target Renja SKPD Tahun 2016 (n-2)	Realisasi Renja SKPD Tahun 2016 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan tahun 2017 (n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10= (5+7+9)	11=(10/4)	11
I	<b>Program Upaya Peningkatan Kesehatan Masyarakat</b>	<b>Terwujudnya Peningkatan kesehatan masyarakat</b>	<b>60%</b>	<b>100.00%</b>	<b>100.00%</b>	<b>100.00%</b>	<b>100.00%</b>	<b>60 %</b>	<b>86 %</b>	<b>100.00%</b>	
1	Pembinaan Sekolah Sehat	Terbinanya lingkungan sekolah yang sehat	7 Sekolah	4 sekolah	4 sekolah	4 sekolah	100.00%	7 sekolah	15 sekolah	300.00%	
2	Advokasi dan Sosialisasi Narkoba dan HIV/AIDS	Kelembagaan aktif dan dapat menanggulangi kasus narkoba dan HIV/AIDS	12 Kecamatan	0	70 %	70 %	100 %	60 %	60 %	100 %	
3	Koordinasi dan Fasilitasi Komosi Pengendalian Zoonosi	Menurunnya Penyakit hewan yang menular ke manusia	70%	70 %	70 %	70 %	100 %	60 %	60	100 %	

II	<b>Program Pengembangan Data &amp; Informasi</b>	<b>Tersedianya data dan informasi Investasi</b>	<b>83%</b>	<b>75.00%</b>	<b>100.00%</b>	<b>100.00%</b>	<b>100 %</b>	<b>100.00%</b>	<b>87.50%</b>	<b>100.00%</b>	
4	Penyiaran dan pelaporan harga kebutuhan 9 bahan pokok dan barang strategis lainnya.	Terlaksananya penyiaran dan pelaporan harga kebutuhan 9 bahan pokok		2 semester	2 semester	2 semester	100.00%	2 Semester	6 Semester	300.00%	
5	Pembuatan film dokumenter tentang profil, potensi, dan investasi daerah	Jumlah film dokumenter yang dihasilkan	1 Film	0	0	0	0	1 Flm	1 Film	100 %	
6	Pembuatan baliho/ billboard potensi dan promosi daerah	Jumlah baliho/billboard yang dihasilkan	4 Unit		0	0	0	4 Unit	4 Unit	100 %	
7	Penyiaran dan pelaporan harga kebutuhan pokok dan barang strategis lainnya	Tersebaranya Informasi harga Kebutuhan pokok melalui Media Radio	83 % ( 53 kali Penyiaran	2 semester	2 semester	2 semester	100.00%	2 Semester	6 Semester	300.00%	
III	<b>Program perencanaan pembangunan daerah</b>	<b>Adanya dokumen penetapan kinerja Pemda</b>	1 Kali	<b>0.00%</b>	<b>1 Kali</b>	<b>1 Kali%</b>	<b>100%</b>	<b>1 Kali</b>	<b>1 Kali</b>	<b>100%</b>	
8	Koordinasi Penyusunan Kinerja Pemerintah Daerah	Tersedianya dokumen penetapan kinerja pemerintah kab. Enrekang setiap tahun	1 Kali	<b>0.00%</b>	<b>1 Kali</b>	<b>1 Kali</b>	<b>100%</b>	<b>1 Kali</b>	<b>1 Kali</b>	<b>100%</b>	
IV	<b>Program pengembangan sistim pelaporan, Monitoring/Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah</b>	<b>1 . Persentase pemenuhan pelaporan pemda yang dipersyaratkan (LKPJ, LPPD, ILPPD dan LAKIP) 2. Cakupan pengendalian administrasi atas program pembangunan</b>	<b>100%</b>	<b>85.71%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100 %</b>	<b>100 %</b>	<b>100.00%</b>	
9	Koordinasi Penyusunan LKPJ, LPPD, dan ILPPD	Terwujudnya peningkatan pembangunan daerah di Kabupaten Enrekang	100%	3 Lpr	3 Lpr	3 Lpr	100.00%	3 Laporan	9 Lpr	300.00%	
10	Penyusunan LAKIP Daerah	Tersedianya laporan capaian kinerja pemerintah kabupaten Enrekang	1 Kali	10 Expl	10 Expl	10 Expl	100.00%	10 Exp	30 Exp	300.00%	





	<b>daya alam</b>	<b>pengelolaan sumber daya alam 2. prekuensi koordinasi pengendalian SDA dan LH</b>									
19	Penyusunan regulasi tentang sumber daya alam	Terwujudnya regulasi mengenai kegiatan sumber daya alam bidang pertambangan, pertanian, kehutanan, peternakan dan perikanan serta lingkungan hidup	1 Perda/Perbup	0	0	0	0	0	0	0 %	
20	Sosialisasi regulasi mengenai kegiatan sumber daya alam	Sosialisasi regulasi mengenai kegiatan sumber daya alam	150 Org	0	0	0	0	0	0	0 %	
21	Koordinasi tentang hasil produksi di bidang pertambangan	Terciptanya koordinasi tentang hasil produksi di bidang pertambangan	15 Kali	0	0	0	0	12 Kali	12	100 %	
22	Penyusunan perencanaan program pengendalian SDA dan lingkungan hidup	Terkoordinasinya perencanaan dan penyusunan program pembangunan pengendalian SDA dan lingkungan hidup	12 kali	0	0	0	0	10 Kali	10	100 %	
23	Koordinasi tata kelolah pemanfaatan SDA	Meningkatnya efektifitas dan efisiensi tata kelola pemanfaatan SDA bagi masyarakat	12 kec.	0	0	0	0	12 Kec	12 Kec	100 %	
24	Identifikasi dan inventarisasi obyek wisata alam	Terlaksananya identifikasi dan inventarisasi obyek dan daya tarik wisata alam khusus trekking, mendaki gunung, rekreasi air, dan wisata religius,	12 kec.	0	0	0	0	12 Kec	12 Kec	100 %	
VIII	<b>Program Peningkatan kualitas dan akses informasi sumber daya alam</b>	<b>Terwujudnya akses informasi SDA</b>	<b>60%</b>	0	0	0	0	50 %	50 %	100 %	
25	Pengadaan bahan informasi/ data sumber daya alam	Tersedianya pengadaan bahan informasi berupa data sumber daya alam dalam bentuk : buku,	100 buah	0	0	0	0	100 Buah	100 Buah	100 %	

		brosur, leaflet, poster, dll									
26	Penyebarluasan informasi sumber daya alam melalui jaringan internet	Tersedianya pembuatan bahan informasi sumber daya alam melalui jaringan internet	1 kali	0	0	0	0	1 Kali	1 Kali	100 %	
27	Pembuatan Peta Potensi SDA	Tersedianya peta potensi sumber daya alam di bidang pertambangan, pertanian, peternakan, perikanan dan kehutanan,	4 buah	0	0	0	0	4 Buah	4 Buah	100 %	
28	Inventarisasi dan verifikasi Unsur rupa bumi	Terwujudnya data dan informasi yang akurat tentang unsure rupa bumi	2 Unsur (alam dan	0	0	0	0.00%	0	0	0.00%	
IX	<b>Program Penguatan Kelembagaan dan Pengarusutamaan Gender dan Anak</b>	<b>Terwujudnya kelembagaan dan penagrutamaan gender dan anak</b>	<b>20%</b>		20 %	20%	100 %	20 %	40 %	200 %	
29	Pembinaan Potensi Organisasi dan Lembaga Masyarakat yang berperan dalam pemberdayaan perempuan dan anak	Menurunnya angka tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak	20%	1 Kali	1 Kali	1 Kali	100.00%	20 %	3 Kali	300.00%	
30											
XIV	<b>Program Pembinaan Kesejahteraan Sosial Masyarakat</b>	<b>Prekuensi kegiatan pasilitasi dan pembinaan keagamaan</b>	<b>90%</b>	0	90 %	90 %	100 %	100 %	100 %	300 %	
31	Pendidikan dan pelatihan Pembina TPA/Guru Mengaji	Terlaksananya Kualifikasi Kompetensi Pembina TPA	50 Pembina TPA/ Guru Mengaji	120 Guru mengaji	120 Guru mengaji	120 Guru mengaji	100.00%	50 Pembina TPA/guru ngaji	360 Guru mengaji	300.00%	
32	Pembinaan kerohanian lingkup Pemerintah	Meningkatnya Pemahaman Nilai-nilai Al-Quran sehingga tercapai PNS yang berkualitas IMTAG dan	22 Kali	22 Kali	22 Kali	22 Kali	100 %	22 Kali	100 %	300 %	

	Kabupaten Enrekang	IPTEK										
33	Penyelenggaraan Pemberangkatan dan Pemulangan Jamaah Haji Asal Kab. Enrekang.	Terwujudnya Kelancaran Penyelenggaraan Pemberangkatan dan Pemulangan Jamaah Haji Asal Kab. Enrekang.	2 Kali									
				2 Kali	2 Kali	2 Kali	100 %	2 Kali	100%	300%		
34	Pembinaan Kegiatan Keagamaan Islam Lainnya.	Terwujudnya pelaksanaan kegiatan keagamaan	10 Kali									
				10Kali	10 Kali	10 Kali	100 %	10 Kali	100 %	300%		
35	Penyelenggaraan MTQ Tingkat Kabupaten Enrekang	Terpilihnya Qari' dan Qariah Terbaik di Kabupaten Enrekang	23 Cabang Lomba									
					0	0	0	0	0	0 %		
36	Pelaksanaan MTQ Tingkat Provinsi	Terpilihnya Qari', Qariah, Mufassil dan hafiz yang mewakili Kab. Enrekang	23 Cabang Lomba									
					0	0	0	0	0	0 %		
37	Pelaksanaan STQ Tingkat Provinsi	Terpilihnya Qari', Qariah, Mufassil dan hafiz yang mewakili Kab. Enrekang										
					0	0	0	3 Cab Lomba	3 Cam Lomba	100 %		
38	Penyelenggaraan Festival Anak Saleh Tingkat Kabupaten	Terpilihnya Hafidz-Hafidzah dan Mufasir-Mufasirah yang mewakili Kabupaten Enrekang di Arena FASi Tingkat Provinsi										
					0	0	0	23 Cab Lomba	23 Cab Lomba	100 %		
39	Pelaksanaan Safari Ramadhan	Terwujudnya safari ramadan pemkab dengan Masyarakat Enrekang	12 Kecamatan									
					12	12	100 %	12 Kec	12 Kali	100 %		
40	Koordinasi dan fasilitasi Bagian Kesejahteraan Rakyat	Terlaksananya Koordinasi Nagian Kesra	12 Kali									
					12 Kali	12 Kali	100 %	12 Kali	12 Kali	100 %		
XV	<b>Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi</b>	<b>Terwujudnya promosi dan kerjasama investasi</b>	6 kali Pameran	100.00%	2 Kali	2 Kali	100.00%	4 Kali	100.00%	100.00%		

41	Penyelenggaraan pameran investasi	Terlaksananya Pameran Investasi dan Pameran Produk Unggulan UMKM	6 kali Pameran	6 Kali	6 Kali	6 Kali	100.00%	4 kali	18 Kali	300.00%	
42	Pelaksanaan koordinasi antar kabupaten/kota, propinsi terkait kebijakan koperasi	Terlaksananya Koordinasi Antar Kabupaten/Kota, Propinsi terkait kebijakan koperasi	30 KUKM	0	0	0	0	30 KUKM	30 KUKM	100 %	
XVI I	<b>Program Peningkatan Peran serta Kepemudaan</b>	<b>Jumlah generasi muda/pemuda berprestasi yang dibina</b>	25 kali Koordinasi		25 x Koordinasi	25 x Koordinasi	100 %	25 Koordinasi	50 Koordinasi	200 %	
43	Koordinasi Pembinaan Generasi Muda/Pemuda Berprestasi	Terlaksananya koordinasi Pembinaan Terhadap Generasi Muda/Pemuda Berprestasi	25 kali Koordinasi		25 x Koordinasi	25 x Koordinasi	100 %	25 Koordinasi	50 Koordinasi	200 %	
XVI II	<b>Program peningkatan sarana dan prasarana olah raga</b>	<b>Jumlah fasilitas olah raga yang dikelola dan ditangani secara operasional dan pemeliharaan</b>	<b>85%</b>		3 Unit	3 Unit	100 %	85 %	5	185 %	
44	Pemeliharaan rutin/berkala Sarana Prasarana Olahraga	Terlaksananya Pemeliharaan Sarana Prasarana Olahraga	3 Unit		3 Unit	3 Unit	100 %	3 Unit	6 Unit	100 %	
XX	<b>Program pengembangan wawasan kebangsaan</b>	<b>Terwujudnya pemberdayaan kelompok masyarakat dalam menjaga keamanan lingkungan</b>	<b>12 Klp</b>		12 Klp	12 Klp	100 %	12 Klp	24 Klp	200 %	
45	Koordinasi Pembinaan Masyarakat Tentang Wawasan Kebangsaan	Terlaksananya Pembinaan tentang Peningkatan Wawasan Lingkungan/ Kebangsaan	20 kali Koordinasi		20 X Koordinasi	20 X Koordinasi	100 %	20 Kali Koordinasi	40 Klp	200 %	
46	Koordinasi Pembinaan Keamanan & Ketertiban serta Perlindungan Masyarakat	Terlaksananya Keamanan dan Ketertiban Masyarakat.	30 kali Koordinasi		30 X Koordinasi	30 X Koordinasi	100 %	30 Kali Koordinasi	60 Kali	200 %	

47	Koordinasi dan pemantauan Pelaksanaan Pemilihan Umum	Terwujudnya pelaksanaan Pemilu yang Luber	1 Kali	0	0	0	0	0	0	0	
XXI	<b>Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan</b>	<b>Terwujudnya pemberdayaan kelompok masyarakat dalam menjaga keamanan lingkungan</b>	30 kali Koordinasi		30 X Koordinasi	30 X Koordinasi	100 %	30 Kali Koordinasi	60 Kali	200 %	
48	Koordinasi pelaksanaan pemantauan kegiatan politik	Terlaksananya pelaksanaan koordinasi pemantauan kegiatan politik	25 kali Koordinasi		25 Kali	25 Kali	100 %	25 Kali Koordinasi	50 Kali	200 %	
49	Koordinasi pengutan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pedesaan	Terlaksananya koordinasi Kelembagaan dan Organisasi Masyarakat Pedesaan	30 kali Koordinasi		30 Kali	30 Kali	100 %	30 Kali Koordinasi	60 Kali	200 %	
XXI I	<b>program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah / wakil kepala daerah</b>	<b>Tingkat realisasi rencana aktifitas kegiatan Bupati/Wakil Bupati</b>	100%	87.50%	87.50%	87.50%	100.00%	100.00%	100.00%	114.29%	
50	Dialog/Audensi KDH/WKDH dengan Tokoh Masyarakat dan pimpinan /anggota Organisasi Masyarakat	Terjalannya komunikasi antara BKDH/WKDH dengan Tokoh Masyarakat	100%	1 TA	1 TA	1 TA	100.00%	1 TA	3 TA	300.00%	
51	Rapat koordinasi pejabat pemerintah daerah	Terwujudnya koordinasi antar pejabat pemerintah daerah	100%	1 TA	1 TA	1 TA	100.00%	1 TA	3 TA	300.00%	
52	Kunjungan kerja / inspeksi kepala daerah / wakil kepala daerah	Terwujudnya pengawasan KDH/WKDH	100%	1 TA	1 TA	1 TA	100.00%	1 TA	3 TA	300.00%	
53	Koordinasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah lainnya	Meningkatnya dengan pemerintah pusat dan pmda lainnya	100%	1 TA	1 TA	1 TA	100.00%	1 TA	3 TA	300.00%	
54	Rapat Kerja Daerah	Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang lebih efektif dan efisien	100%	1 Kali	1 Kali	1 Kali	100.00%	1 Kali	3 Kali	300.00%	

55	Peningkatan operasional rumah tangga kepala daerah / wakil kepala daerah	terpenuhinya operasional rumah tangga Bupati dan Wakil Bupati	100%	2 Unit	2 Unit	2 Unit	100.00%	2 Unit	6 Unit	300.00%	
56	Penerimaan tamu-tamu pemda	Meningkatnya pelayanan tamu-tamu pemda	100%	1 TA	1 TA	1 TA	100.00%	1 TA	3 TA	300.00%	
XXI II	<b>Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah</b>	<b>Tingkat kesesuaian paket regulasi pengelolaan keuangan daerah dengan regulasi pemerintah pusat</b>	<b>100%</b>			100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	200 %
57	Penyusunan standar harga satuan barang dan jasa	Terlaksananya Penyusunan Standarisasi Harga Barang dan Jasa	100 Buku	62 Buku	62 Buku	62 Buku	100.00%	100 Buku	196 buku	316.13%	
58	Unit layanan pengadaan barang dan jasa	Terlaksananya system pelelangan barang dan jasa	100 %	0	0	0	0	100 %	100 %	100 %	
59	Peningkatan Manajemen dan Pelayanan Pengelolaan administrasi asset/Barang Daerah	Tersedianya laporan Administrasi Asset/Barang secara terkendal	100 %	0	0	0	0	100 %	100 %	100 %	
60	Pengendalian Pengawasan, Pengawasan, Pemantauan dan monitoring asset/barang daerah	Tersedianya laporan Adm penggunaan asset/barang daerah secara terkendali	1 Paket	0	0	0	0	1 Paket	1 Paket	100 %	
61	Rekonsiliasi laporan realisasi asset/barang daerah per SKPD TA 2018 dekonsentrasi dan tugas pembantuan	Terwujudnya rekonsiliasi kegiatan pemda	1 Paket	0	0	0	0	1 Paket	1 Paket	100 %	
62	Inventarisasi dan Penertiban Masalah Pertanahan dalam wilayah Kabupaten Enrekang	Terlaksananya Inventarisasi dan Penertiban Masalah Pertanahan dalam wilayah Kabupaten Enrekang	1 Paket	0	0	0	0	1 Paket	1 Paket	100 %	

63	Rekonsiliasi dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan	Terwujudnya rekonsiliasi kegiatan pemda	16 Kegiatan	0	16 Kegiatan	16 Kegiatan	100 %	16 Keg	32 Keg	200 %	
64	Koordinasi Pengelolaan Adm. Keuangan	Terlaksananya Koordinasi Pengelolaan Adm. Keuangan Daerah	12 Bulan	1 TA	1 TA	1 TA	100.00%	1 TA	3 TA	300.00%	
65	Pengelolaan pelaporan inventarisasi asset/barang daerah	Tersedianya laporan inventarisasi Asset/Barang Daerah	1 Paket	0	0	0	0	1 Paket	1 Paket	100 %	
66	Penghapusan asset/barang milik daerah	Tersedianya barang/Asset Daerah yang akan dihapus	1 Paket	0	0	0	0	1 Paket	1 Paket	100 %	
67	Penyusunan Neraca Asset	Tersedianya data penyusunan neraca	1 Paket	0	0	0	0	1 Paket	1 Paket	100 %	
68	Pengsertifikatan Tanah Milik Pemda	Terwujudnya Pengsertifikatan Tanah Milik Pemda	1 Paket	0	0	0	0	1 Paket	1 Paket	100 %	
69	Penyusunan RKBMD pengadaan dan RKBMD Penyusunan RKBD Pemeliharaan	RKBMD Pengadaan dan RKBMD pemeliharaan	1 Paket	0	0	0	0	1 Paket	1 Paket	100 %	
70	Penelaian dan penafsiran asset	Terlaksananya penilaian barang milik daerah	1 Paket	0	0	0	0	1 Paket	1 Paket	100 %	
XXI V	<b>Program Peningkatan Sistim pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH</b>	<b>Tingkat Penyelesaian /tindak lanjut hasil temuan pemeriksaan</b>	<b>95%</b>	50.00%	50.00%	50.00%	50.00%	80 %	100.00%	200.00%	
71	Tindak lanjut hasil temuan pengawasan	Jumlah Rekomendasi Inspektorat Kabupaten, Inspektorat Provinsi, BPKP, dan BPK ditindaklanjuti	70%	20 Temuan	20 Temuan	20 Temuan	100.00%	70 %	60 Temuan	300.00%	



72	Koordinasi Penyampaian Laporan Hasil kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN)	Koordinasi Penyampaian Laporan Hasil kekeniyaan Penyelenggara Negara (LHKPN)	27%	12 Pejabat	12 Pejabat	12 Pejabat	100.00%	25 %	36 Pejabat	300.00%	
73	Pengembangan analisis dan penelahan kebijakan daerah	Terwujudnya Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan KDH	80%		80 %	80 %	100 %	80 %	80 %	200 %	
XX V	<b>Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistim dan Prosedur Pengawasan</b>	<b>Jumlah SKPD yang ditetapkan sebagai zona integritas</b>	<b>5 SKPD</b>		0	0	0	5 SKPD	5 SKPD	100 %	
74	Penetapan zona integritas Pemda	Ditetapkannya zona integritas pada Pemkab. Enrekang	2 SKPD	0	0	0	0	4 SKPD	4 SKPD	200 %	
75	Monitoring dan pelaporan pelaksanaan percepatan pemberantasan korupsi	Tersedianya laporan percepatan pemberantasan korupsi	1 Kali		0	0	0	1 Kali	1 Kali	100 %	
76	Monitoring dan evaluasi pelaksanaan pakta integritas pemda	Tersedianya dokumen pakta integritas pemda	1 Kali		0	0	0	1 Kali	1 Kali	100 %	
XX VI	<b>Program Peningkatan kerjasama antar pemerintah Daerah</b>	<b>Jumlah dokumen perjanjian kerjasama pemda dengan daerah (lembaga lainnya)</b>	<b>10 MOU</b>	100.00%	100.00%	100.00%	83.33%	10 MOU	100.00%	100.00%	
77	Pelaksanaan Koordinasi antar kabupaten	Terlaksananya Koordinasi Antar Kabupaten/Kota, Propinsi & Luar Propinsi	65 Kali	10 Kali	20 Kali	10 Kali	50.00%	60 Kali	60 Kali	100.00%	
78	Koordinasi antara pemda dengan APKASI	Terwujudnya Koordinasi antara Pemda dengan Asosiasi Pemkab Seluruh Indonesia ( APKASI )	80%	1 TA	1 TA	1 TA	100.00%	80 %	3 TA	300.00%	
XX VII	<b>Program Penataan Peraturan Perundang-</b>	<b>% realisasi prolegda yang ditetapkan menjadi perda</b>	<b>8 Perda</b>	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	8 Perda	100.00%	100.00%	

	<b>Undangan</b>										
79	Legislasi rancangan peraturan perundang-undangan	Perda ditetapkan berdasarkan Program Legislasi Daerah	80%	8 Perda	8 Perda	8 Perda	100.00%	75 %	24 Perda	300.00%	
80	Pelembaran daerah dan dokumentasi produk hukum daerah	Jumlah Perda, Perbup dan Keppub Diundangkannya/ ditetapkan	10 perda, 30 Perbup, 700 Keppub	320 Perda	320 Perda	320 Perda	100.00%	10 perda, 30 Perbup, 700 Keppub	740 Perda	740.00%	
81	Evaluasi dan Perumusan Kebijakan Daerah	Jumlah Peraturan Daerah, Peraturan Bupati, dan Keputusan Bupati yang telah diundangkan/ditetapkan didokumentasikan	10 perda, 30 Perbup, 700 Keppub		10 perda, 30 Perbup, 700 Keppub	10 perda, 30 Perbup, 700 Keppub	100 %	10 perda, 30 Perbup, 700 Keppub	20 perda, 60 Perbup, 1400 Keppub	200 %	
XX VIII	<b>Program Penataan Daerah Otonomi Baru</b>	<b>Jumlah kecamatan dan desa yang dimekarkan</b>	1 Kec. 5 Desa/Kel	100%	100%	100%	100.00%	1 Kec. 5 Desa/Kel	100%	100.00%	
82	Pasilitasi percepatan penyelesaian tapal batas wilayah administrasi antar daerah	Terselesaikannya batas wilayah kabupaten dan Kecamatan, Desa/Kel	1 Patok Batas	5 Patok	3 Patok /Batas	3 Patok /Batas	100.00%	3 Patok Batas	11 Patok	300.00%	
83	Pemekaran wilayah kecamatan dan Desa/Kelurahan	Meningkatnya pelayanan kepada masyarakat	1 Kec. 5 Desa/Kel		0	0	0	1 Kec. 5 Desa/Kel	1 Kec. 5 Desa/Kel	100 %	
84	Penyusunan laporan evaluasi kemampuan penyelenggaraan otonomi daerah	Terwujudnya laporan kesejahteraan dan pemerataan otonomi daerah	1 Laporan		0	0	0	0	0	0	
85	Sosialisasi dan publikasi Peta Batas Daerah Antar Kabupaten dan Batas Wilayah Dalam Kabupaten	Terlaksananya Sosialisasi dan publikasi Peta Batas Daerah Antar Kabupaten dan Batas Wilayah Dalam Kabupaten	12 Kecamatan		0	0	0	0	0	0	
XXI X	<b>Program Peningkatan Pengelolaan Administrasi dan</b>	<b>Tingkat pelaksanaan sistim pengendalian administrasi pemerintahan, kepegawaian,</b>	<b>80%</b>	88.24%	88.24%	88.24%	82.35%	75.00%	88.24%	100.00%	

	<b>Kelembagaan Pemerintah Daerah</b>	<b>pembangunan dan administrasi umum pemda</b>									
86	Pembinaan Administrasi Kepegawaian dan Pemerintahan	Terlaksananya Pembinaan dan Koordinasi Kepegawaian dan Pemerintahan	90%	1 TA	1 TA	1 TA	100.00%	90 %	3 TA	300.00%	
87	Pembinaan dan Koordinasi Administrasi Pemerintahan	Terlaksananya Pembinaan dan Koordinasi Adm. Pemerintahan	90%	1 TA	1 TA	1 TA	100.00%	90 %	3 TA	300.00%	
88	Pembinaan dan Koordinasi Administrasi Pembangunan	Terlaksananya Pembinaan dan Koordinasi Adm. Pembangunan	90%	1 TA	1 TA	1 TA	100.00%	90 %	3 TA	300.00%	
89	Pembinaan dan Koordinasi Administrasi umum dan Kepegawaian	Terlaksananya Pembinaan dan Koordinasi Adm. Umum dan Kepegawaian	90%	1 TA	1 TA	1 TA	100.00%	90 %	3 TA	300.00%	
90	Sosialisasi Standar Pelayanan Minimum	Meningkatnya pelaksanaan SPM	1 Kali	0	0	0	0	1 Kali	1 Kali	100 %	
91	Pembinaan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)	Proses pelayanan yang cepat, tepat dan akuntabel di tingkat kecamatan	90%		80 %	80 %	100 %	80 %	200 %	200 %	
92	Pembinaan dan Penataan Administrasi Kecamatan dan Kelurahan	Tingkat kemampuan aparatur kecamatan dalam penataan adm. Kecamatan	90%	20 %	0	0	0	80 %	100 %	100 %	
93	Koordinasi, Konsultasi dan pembinaan Adm Pemerintahan	Terwujudnya pengelolaan Adm Pemerintahan yang baik	90 %		0	0	0	0	0	0	
XX X	<b>Program Peningkatan pelayanan pengadaan dan pembinaan penyedia barang dan jasa</b>	<b>Cakupan implementasi sistim pengadaan barang dan jasa secara elektronik</b>	<b>80%</b>								
					100 %	100 %	100 %	80 %	180 %	180 %	
94	Unit layanan pengadaan barang dan jasa	Terimplementasinya sistem pelepasan barang dan jasa	43 SKPD		4 SKPD	41 SKPD	100 %	41 SKPD	43 SKPD	200 %	



	agrarian di Kab. Enrekang	dimanfaatkan masyarakat									
XX XII	<b>Program Pengembangan Ketatalaksanaan Pemerintah Daerah</b>	<b>Tingkat penerapan regulasi dan pedoman tatalaksana penyelenggaraan pemerintahan daerah</b>	<b>85 %</b>								
				75 %	75%	75 %	100 %	85 %	75 %	225 %	
105	Penataan kelembagaan Pemda	Meningkatnya penataan Kelembagaan Pemda	75 %	0	75 %	75 %	0 %	75 %	75	150 %	
106	Penyusunan Tata naskah Dinas	Tersedianya pedoman tata naskah dinas daerah	28 Exp	0	0	0	0.00%	0	0	0.00%	
107	Penataan Administrasi Kepagawain Setda	Meningkatnya penataan adm. Kepagawain di Setda	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	100 %	12 Bulan	32	300%	
108	Penyusunan Buku Kerja Pemerintah Daerah	Tersedianya buku kerja pemerintah daerah	200 Exp	0	200 Exp	200 Exp	100 %	200 Exp	400	200 %	
109	Koordinasi, Konsultasi ketatalaksanaan, kelembagaan dan kepegawain	Meningkatnya koordinasi bidang kelembagaan dengan Pemprop dan Pempus	20 Kali	20 Kali	20 Kali	20Kali	100 %	20 Kali	60 Kali	300 %	
110	Penataan data Struktur Organisasi Pemda	Tersedianya informasi struktur Pemda	3 Unit	0	0	0	0 %	0			
111	Penyusunan Peraturan-peraturan yang terkait ketatalaksanaan	Meningkatnya produk ketatalaksanaan	15 Perbup,SK,SE, dll	0	0	0	0	15 Perbub,SK,SE, dll	15 Perbub,SK,SE, dll	100 %	
112	Penyusunan TUPOKSI	Tersedianya Perbup tentang Tupoksi Jabatan Pemda	13 SKPD	0	0	0	0	13 SKPD	13 SKPD	100 %	
113	Lomba Unit Pelayanan Publik	Terpilihnya SKPD yang mewakili Kab. Dalam lomba UPB di tingkat Prop/Pusat	1 Kali	0	0	0	0	1 Kali	1 Kali	100 %	
114	Penyusunan Laporan Pencapaian SPM	Tersedianya laporan pencapaian SPM di daerah	2 Kali	0	0	0	0	2 Kali	2 Kali	100 %	
115	Penyusunan SOP SKPD	Jumlah SKPD yang memiliki SOP	<b>143</b>	0	43 SKPD	43 SKPD	100 %	100 %	43 SKPD	100 %	

116	Penyusunan IKM	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	50 %	0	0	0	0	50 %	50 %	100 %	
XXI II	<b>Program Penanganan/perlindungan hukum dan pembinaan kesadaran hukum/HAM</b>	<b>1. % Penyelesaian permasalahan Hukum Pemda 2. Jumlah kelompok masyarakat sadar hokum</b>	100 %	100 %	100 %	100 %	100%	100 %	100 %	300 %	
117	Pemberian Bantuan Hukum	Tingkat Penyelesaian Permasalahan Perdata dan TUN	100 %	100 %	100 %	100 %	100%	100 %	100 %	300 %	
118	Penyuluhan Hukum dan Sosialisasi Perda	Jumlah pelaksanaan Penyuluhan Hukum dan Sosialisasi Produk Hukum Daerah	12 Kali	5 Kali	5 Kali	5 Kali	100.00%	12 Kali	15 Kali	300.00%	
119	Pembinaan Desa Sadar Hukum/Kelompok Sadar Hukum	Jumlah Kelompok Sadar Hukum /Desa Sadar Hukum	4 Klp	0	0	0	0	3 Klp	3 Klp	100 %	
120	Pelaksanaan RANHAM	SKPD memiliki program Pro HAM	90%	8 Perda	8 Perda	8 Perda	100.00%	80 %	24 Perda	300.00%	
XX XV	<b>Program pengembangan komunikasi, informasi, dan media massa</b>	<b>% data dan informasi kegiatan pemda yang dipublikasikan kepada masyarakat</b>	<b>80%</b>	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	80%	100.00%	100.00%	
121	Peningkatan pelayanan sandi	Meningkatnya pelayanan adm. persandi dan persuratan lainnya	100%	1 TA	1 TA	1 TA	100.00%	100 %	3 TA	300.00%	
122	Pelaksanaan publikasi dan dokumentasi pemda	Masyarakat dapat mengetahui informasi tentang pembangunan daerah melalui media cetak dan elektronik dan tersedianya dokumentasi daerah	100%	1 TA	1 TA	1 TA	100.00%	100 %	3 TA	300.00%	
123	Pelaksanaan jumpa pers Pemda	Meningkatnya pemahaman masyarakat tentang pelaksanaan pembangunan dan pengembangan potensi daerah	100 %	8 Kali	18 Kali	18 Kali	100.00%	100 %i	42 Kali	525.00%	

124	Pelayanan pengaduan SMS Center	Terpenuhinya kebutuhan operasionalisasi SMS dari masyarakat	100 %	100 %	100 %	100 %	100%	100 %	100 %	300 %	
125	Pengadaan sarana telekomunikasi Setda	Jumlah bagian yang terkoneksi jaringan internet	3 Bagian	0	3 Bagian	3 Bagian	100 %	3 Bagian	6 Bag	200 %	
XX XVI	<b>Program Peningkatan Produksi Pertanian / Perkebunan</b>	<b>Meningkatnya produksi pertanian/perkebunan</b>	<b>80%</b>	80 %	100 %	100 %	100 %	80 %	240 %	240 %	
126	Peningkatan kualitas produksi tembakau	Meningkat Produksi dan Kwalitas Tembakau	90 Orang Petani	0	70 Petani	70 Petani	100 %	80 Orang	150 Org	200 %	
XX X	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>Terwujudnya pelayanan Administrasi Kantor</b>	<b>90%</b>	86.67%	86.67%	86.67%	86.67%	90 %	100.00%	86.67%	
127	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air, dan listrik	Tersedianya jasa pelayanan komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 Bulan	1 TA	1 TA	1 TA	100.00%	12 Buln	3 TA	300.00%	
128	penyediaan jasa jaminan pemeliharaan kesehatan Bupati dan Wakil Bupati	Terjaminnya tingkat kesehatan Bupati dan Wakil Bupati (Cek up)	2 Kali	48 Orang	48 Orang	48 Orang	100.00%	2 Kali	142 Orang	295.83%	
129	penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	tersedianya komponen alat listrik/penerangan bangunan kantor	12 bulan	1 TA	1 TA	1 TA	100.00%	12 Bulan	3 TA	300.00%	
130	rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Terwujudnya koordinasi dan konsultasi keluar daerah	12 Bulan	1 TA	1 TA	1 TA	100.00%	12 Bulan	3 TA	300.00%	
131	koordinasi, konsultasi dalam daerah dan peninjauan lapangan	terlaksananya koordinasi dalam daerah dan peninjauan lapangan	12 Bulan	1 TA	1 TA	1 TA	100.00%	1 Bulan	3 TA	300.00%	
132	penyediaan bahan bakar minyak mesin/kendaraan operasional kantor	tersedianya bahan bakar minyak untuk keperluan kendaraan operasional	5 Unit	1 TA	1 TA	1 TA	100.00%	5 Unit	3 TA	300.00%	

133	penyediaan peralatan kebersihan dan perlengkapan dapur kantor	tersedianya peralatan kebersihan dan perlengkapan dapur kantor	12 bulan	1 TA	1 TA	1 TA	100.00%	12 Bulan	3 TA	300.00%	
134	peningkatan pelayanan mess pemda di jakarta	meningkatnya pelayanan mess pemda di Jakarta	12 bulan	1 TA	1 TA	1 TA	100.00%	12 Bulan	3 TA	300.00%	
135	penataan halaman dan penataan lapangan upacara	terlaksananya penataan halaman kantor bupati yang baik	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	100.00%	1 Unit	3 Unit	300.00%	
136	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan baik buku,koran,majalah,bulletin,dan media cetak lainnya	30 Media	28 Media	27 Media	27 Media	100.00%	37 Media	62 Media	229.63%	
137	Pelaksanaan pelayanan keprotokolan pemda	Terpenuhinya pelayanan keprotokolan pemerintah daerah dan masyarakat yang beretika	100%	1 TA	1 TA	1 TA	100.00%	100 %	3 TA	300.00%	
138	Pengelolaan Adm. Keuangan	Terwujudnya Pengelolaan Administrasi Keuangan dan Perkantoran efektif	100%	1 TA	1 TA	1 TA	100.00%	100 %	3 TA	300.00%	
139	Pelaksanaan Verifikasi Keuangan	Terlaksananya verifikasi SPJ keuangan setda	12 Bulan	1 TA	1 TA	1 TA	100.00%	12 Bulan	3 TA	300.00%	
140	Penyusunan Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan	Tersedianya laporan realisasi fisik dan keuangan kegiatan pembangunan	41 Exp	36 Exp	0	0	0.00%	41 Exp	72 Exp	200.00%	
141	Pelaksanaan pelelangan /pengadaan barang dan jasa	Terlaksananya pelelangan dan pengadaan barang dan jasa	100 %	0	0	0	0	100 %	100 %	100 %	
XX XVI I	<b>Program Peningkatan Sarana dan prasarana Aparatur</b>	<b>Terwujudnya sarana dan prasarana aparatur yang memadai</b>	<b>90%</b>	100.00%	100.00%	100.00%	91.11%	90 %	100.00%	107.14%	
142	pengadaan kendaraan dinas / operasional	Jumlah kendaraan operasional yang diadakan Terlaksananya pengadaan kendaraan	17 Unit	12 Unit	12 Unit	12 Unit	100%	15 Unit	15 Unit	100.00%	



		operasional roda 4 (Empat)									
		Terlaksananya pengadaan kendaraan operasional roda 2		0 Unit	6 Unit	6 Unit	66.67%	6 Unit	12 Unit	600.00%	
143	Pengadaan peralatan Gedung kantor	Jumlah peralatan kantor yang diadakan	18 item	1 TA	1 TA	1 TA	100.00%	19 Item	3TA	300.00%	
144	Pengadaan Sarana dan Prasarana Aparatur	terlaksananya pengadaan sarana dan parasarana aparatur	25 item	3 Jenis	3 Jenis	3 Jenis	100.00%	10 Item	9 Jenis	300.00%	
145	pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan	Terpeliharanya rumah jabatan Bupati, Wakil Bupati dan Sekda jabatan	2 Unit	3 Unit	3 Unit	3 Unit	100.00%	2 Unit	9 Unit	300.00%	
146	pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas	terpeliharanya rumah dinas mess pemda	2 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	100.00%	2 Unit	3 Unit	300.00%	
147	pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	terpeliharanya gedung kantor Bupati Enrekang	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	100.00%	1 Unit (satu unit/Tahun)	3 Unit	300.00%	
148	pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	terpeliharanya kendaraan dinas Bupati, Wakil Bupati dan Sekda	3 Unit	1 TA	1 TA	1 TA	100.00%	3 Unit	3 TA	300.00%	
149	pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan rumah jabatan/dinas	terpeliharanya perlengkapan rumah jabatan Bupati, Wakil Bupati dan Sekda	3 Unit	3 Unit	3 Unit	3 Unit	100.00%	3 Unit	14 Unit	466.67%	
150	pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Terpeliharanya peralatan gedung kantor	1 Unit	1 TA	1 TA	1 TA	100.00%	1 Unit	3 TA	300.00%	
151	pemeliharaan rutin/berkala peralatan studio dan komunikasi	terpeliharanya alat-alat studio dan komunikasi	2 Studio	1 TA	1 TA	1 TA	100.00%	2 Studio	3 TA	300.00%	
152	pengadaan perlengkapan / peralatan rumah	terlaksananya pengadaan perlengkapan / peralatan rumah	30 Item		30 Item	30 Item	100 %	30 item	60 Item	200 %	

	jabatan bupati	jabatan bupati									
153	pengadaan perlengkapan / peralatan rumah jabatan wakil bupati	terlaksananya pengadaan perlengkapan / peralatan rumah jabatan wakil bupati	20 Item		20 Item	20 Item		100 %	20 Item	40 Item	200 %
154	pengadaan perlengkapan / peralatan rumah jabatan sekda	terlaksananya pengadaan perlengkapan / peralatan rumah jabatan sekda	15 Item		15 Item	15 Item		100 %	15 Item	30 Item	200 %
XX XVI II	<b>Program Peningkatan Kapasitas dan Disiplin Aparatur Pemda</b>	<b>Meningkatnya kedisiplinan Aparatur Pemda</b>	<b>85%</b>	66.67%	66.67%	66.67%	33.33%	85 %	66.67%	100.00%	
155	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Meningkatnya ketaatan dalam berpakaian dinas	200 Org	0	0	0	0.00%	200 Org	0 TA	100.00%	
156	Koordinasi Penegakan Disiplin Aparatur	Meningkatnya koordinasi terhadap pelaksanaan penegakan disiplin aparatur	5 Rakor	1 TA	1 TA	1 TA	100.00%	5 Rakor	3 TA	300.00%	
157	Sosialisasi Peraturan tentang Disiplin PNS	Meningkatnya pengetahuan aparatur terhadap Peraturan Kedisiplinan	1 Kali	0	0	0	0	1 Kali			
158	Pengadaan sarana absensi Elektronik	Meningkatnya kedisiplinan aparatur terhadap jam kerja pegawai	10 Unit	0 Unit	0 uNit	10 Unit	100%	10 Unit	10 Unit	100.00%	
159	Sosialisasi Peraturan tentang pengelolaan barang milik daerah	Terlaksananya sosialisasi pengelolaan barang milik daerah	1 Kali	0	0	0	0	1 Kali	1 Kali	100 %	
160	Diklat Tehnis Tugas dan fungsi bagi PNS	Jumlah PNS yang mengikuti Diklat teknis setiap tahun	30 Orang	120 orang	120 orang	120 orang	100.00%	120 orang	360 orang	300.00%	
161	Pemberian penghargaan bagi PNS berprestasi	Terpilihnya aparatur yang berprestasi	3 Orang	0	0	0	0	3 Org	3 Org	100 %	
162	Diklat Keprotokoleran	Tersedianya tenaga protocol SKPD	43 SKPD	0	0	0	0	43 Org	43 Org	100 %	
163	Sosialisasi paket regulasi tentang pengelolaan	Terwujudnya pemahaman tentang regulasi pengelolaan	250 orang	0	60 )rang	60 Orang	100 %	150 Org	210	200 %	

	keuangan daerah	keuangan									
164	Bintek implementasi paket regulasi tentang pengelolaan keuangan daerah	Terwujudnya implementasi paket regulasi tentang pengelolaan keuangan daerah	150 orang	0	150 Orang	150 Orang	100 %	150 Org	300 Org	200 %	
165	Peningkatan Sumber daya melalui kegiatan promosi dan investasi pembangunan	Meningkatnya wawasan dan pengetahuan aparatur yang mengikuti kegiatan promosi pembangunan setiap tahun	7 Orang	0	7 Orang	7 Orang	100	7 Org	14 Org	200 %	
166	Pembinaan tenaga teknis pelaksanaan pembangunan	Meningkatnya kompetensi PPK, PPTK dan Pengawas lapangan	43 SKPD	0	41 SKPD	41 SKPD	100 %	43 SKPD	43 SKPD	100 %	
167	Diklat dan sosialisasi pengadaan barang dan jasa	Meningkatnya jumlah PNS yang memiliki sertifikat pengadaan barang dan jasa	120 orang	60 Orang	60 Orang	60 Orang	100.00%	110 orang	180 Orang	300.00%	
168	Bintek pengelolaan keuangan daerah dan barang milik daerah	Terwujudnya aparatur yang terampil dalam pengelolaan Barang Daerah	150 Orang	150 Orang	150 Orang	150 Orang	100.00%	150 orang	450 Orang	300.00%	
169	Peningkatan Sumber daya melalui kegiatan promosi dan investasi pembangunan	Meningkatnya wawasan dan pengetahuan aparatur yang mengikuti kegiatan promosi pembangunan setiap tahun	1 Paket	0	0	0	0	1 Paket	1 Paket	100 %	
170	Pengembangan kapasitas Aparatur dan Tim Pembakuan Nama Unsur Rupa Bumi	Terlaksananya peningkatan Kapasitas Aparatur dan Tim Pembakuan Nama Unsur Rupabumi di Kabupaten Enrekang	2 Orang	0	0	0	0	0	0	0 %	
171	Bintek penyusunan laporan penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Terwujudm penyusunan LPPDnya aparatur yang terampil dal	120 Orang	0	0	0	0	0	0	0 %	
217	Diklat keprotokolan	Tersedianya tenaga keprotokolan setiap SKPD	43	0	0	0	0	45 Org	45 Org	100 %	



## **2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Sekretariat Daerah**

Merujuk dari peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pemerintahan Dalam Negeri di Kabupaten/Kota, maka tidak ada target riil yang harus dicapai Sekretariat Daerah Kabupaten Enrekang, sesuai Tugas Pokok dan Fungsinya. Olehnya itu untuk menggambarkan tingkat capaian kinerja pelayanan yang dilaksanakan Sekretariat Daerah, maka dipakai Indikator Kinerja Kunci (IKK) sebagai variabel dalam mengukur kinerja pelayanan di Sekretariat Daerah.

Pada Tahun 2016 telah dilaksanakan program dan kegiatan yang telah mendukung pencapaian kinerja pelayanan Sekretariat Daerah sesuai yang telah ditargetkan dalam renstra. Pada awal tahun 2016 telah ditetapkan target dari masing-masing Indikator Kinerja Kunci (IKK) sebanyak 43 indikator dan ditetapkan target rata-rata capaian yaitu 70% dan pada akhir tahun 2016 telah dievaluasi pencapaian dari masing-masing indikator tersebut dan telah dihasilkan tingkat capaian rata-rata yaitu 92 %.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa pencapaian kinerja pelayanan Sekretariat Daerah untuk tahun 2016 sudah sangat baik, namun masih ada beberapa bagian pelayanan yang masih perlu perbaikan seperti pemberian bantuan kepada mahasiswa Kabupaten Enrekang yang masih perlu mendapat perhatian untuk dilakukan pendataan ulang mahasiswa dan lembaga sosial yang akan dibantu .

Untuk mengetahui dengan jelas capaian kinerja pelayanan Pada Sekretariat Daerah untuk Tahun 2016 dan target yang akan dicapai pada tahun 2017 dan 2018 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

TABEL NO 2.2  
PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN SEKRETARIAT DAERAH  
KABUPATEN ENREKANG

No	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra Sekretariat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan analisis
				Target Tahun 2016 (Thn N-2)	Tahun 2017 (Thn n-1)	Tahun 2018 (Thn n)	Tahun 2019 (Thn n+1)	Tahun 2016 (Thn n-2)	Tahun 2017 (Thn n-1)	Tahun 2018 (Thn n)	Tahun 2019 (Thn n+1)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>A</b>	<b>Mengembangkan sistim administrasi pemerintahan yang handal, demokratis, profesional, bersih, terbuka dan partisipatif dan tanggap terhadap aspirasi masyarakat</b>											
1	Persentase Jumlah Produk hukum yang di dokumentasikan dan di Lembar Daerahkan		100.00 %	90.00%	80%	80%	100.00%	90.00%	100.00%	100.00%	100.00 %	
2	Persentase Ranperda yang telah disetujui oleh DPRD yang diPerda		100.00 %	100.00%	100%	100%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00 %	
<b>3</b>	Persentase draf Ranperda yang oleh SKPD yang menjadi Ranperda yang diajukan ke DPRD		100.00 %	90.00%	80%	80%	100.00%	90.00%	100.00%	100.00%	100.00 %	
4	Persentase jumlah pejabat yang melaporkan harta kekayaannya		100.00 %	50.00%	50%	50%	70.00%	50.00%	50.00%	70.00%	70.00%	

5	Meningkatnya produk hukum daerah		17	68	50	50	20	68	17	20	20	
6	Persentase tindak lanjut temuan hasil audit oleh aparat pemeriksa		80.00 %	100.00%	100%	100%	100.00%	100.00%	80.00%	100.00%	100.00 %	
	Meningkatnya peran lembaga dan organisasi masyarakat pedesaan dalam pembangunan yang meliputi :											
7	- Prosentase pembinaan KSM/LSM		50.00 %	39.19%	49.69%	49.69 %	60.00%	39.19%	50.00%	60.00%	60.00%	
8	- Persentase pembinaan lembaga adat		20.00 %	33.81%	38,28%	38,28 %	30.00%	33.81%	20.00%	30.00%	30.00%	
9	- Persentase pembinaan lembaga organisasi kemasyarakatan		15.00 %	33.81%	35.81%	35.81 %	20.00%	33.81%	15.00%	20.00%	20.00%	
10	Prosentase penyiaran informasi harga sembilan bahan pokok dan barang strategis lainnya pada 5 pasar induk di Kab. Enrekang		100.00 %	95%	95%	95%	100.00%	97%	100.00%	100.00%	100.00 %	
11	Persentase capaian target penerimaan yang ditargetkan		100.00 %	70.09%	70.09%	70.09 %	100.00%	80.00%	100.00%	100.00%	100.00 %	
12	Persentase penyelesaian verifikasi SPJ yang diajukan masing-masing bagian		100.00 %	99.95%	99.95%	99.95 %	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00 %	
13	Prosentase ketersediaan buku standarisasi harga satuan barang dan jasa		100.00 %	100%	100%	100%	100.00%	100%	100.00%	100.00%	100.00 %	

14	Prosentase ketersediaan data potensi sumber daya alam		100.00 %	80%	95%	95%	100.00%	100%	100.00%	100.00%	100.00 %	
<b>B</b>	<b>Terwujudnya Pelayanan administrasi pemerintahan yang berkualitas, dapat diukur dari tahun ke tahun</b>											
15	Persentase penyelesaian kasus tapal batas kabupaten		95.00 %	95.00%	95.00%	95.00 %	96.00%	95.00%	95.00%	96.00%	96.00%	
16	Persentase ketepatan waktu penyampaian laporan		100.00 %	100%	100%	100%	100.00%	100%	100.00%	100.00%	100.00 %	
17	Persentase dokumen perencanaan yang disusun tepat waktu		100.00 %	100.00%	100.00%	100.00 %	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00 %	
18	Persentase program dalam renstra yang diakomodir dalam renja		100.00 %	100%	100.00%	100.00 %	100.00%	100%	100.00%	100.00%	100.00 %	
19	Persentase bagian yang telah terkoneksi dengan internet		100.00 %	100.00%	100.00%	100.00 %	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00 %	
20	Persentase program dalam renja yang diakomodir dalam DPA		100.00 %	100.00%	100%	100%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00 %	
21	Persentase tanah Pemda yang telah disertifikasi		80.00 %	80.00%	80.00%	80.00 %	80.00%	80.00%	80.00%	80.00%	80.00%	
22	Persentase pemberitaan yang positif dimedia tentang pemda dibandingkan dengan seluruh pemberitaan		80.00 %	80.00%	80.00%	80.00 %	80.00%	90.00%	80.00%	80.00%	80.00%	
23	Persentase rekanan yang mengurus SIUJK		80.00 %	20%	20%	20%	80.00%	30%	80.00%	80.00%	80.00%	
<b>C</b>	<b>Mengembangkan koordinasi dengan</b>											



	<b>dinas daerah dan lembaga teknis daerah</b>											
24	Cakupan peningkatan jumlah kebijakan yang diterbitkan berupa Surat Keputusan		170	55	60	60	60	60	60	60	60	
25	Cakupan pelaksanaan rapat Koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan daerah lainnya		70	35	35	35	40	45	35	40	40	
26	Cakupan pelaksanaan rapat koordinasi antar pejabat pemerintah Kab. Enrekang		70	35	35	35	40	35	35	40	40	
27	Cakupan pelaksanaan rapat koordinasi dengan pejabat Muspida		500	1880	1500	1500	1600	1890	1500	1600	1600	
28	Meningkatnya pelaksanaan rapat koordinasi pembangunan		4	9	9	9	9	9	9	9	9	
29	Cakupan pelaksanaan koordinasi penyusunan laporan keterangan pertanggungjawaban Bupati		10	13	13	13	13	13	13	13	13	
<b>D</b>	<b>Meningkatkan kualitas sumber daya manusia aparatur sekretariat daerah</b>											
30	Persentase jumlah pegawai yang mengikuti diklat teknis pada sekretariat daerah		70.00 %	20%	20%	20%	50%	22%	20%	50%	50%	
31	Persentase Pegawai yang mendapat jaminan kesehatan pada Sekretariat Daerah		50.00 %	50%	50%	50%	70%	60%	50%	70%	70%	



41	Persentase pemberian bantuan kepada mahasiswa yang mengajukan permohonan bantuan		100.00 %	94%	99%	99%	100%	100%	99%	100%	100%	
42	Persentase ketersediaan data rumah ibadah dan TPA setiap tahun		100.00 %	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
43	Prosentase bantuan kepada imam masjid dan pembina TPA		100.00 %	100.00%	99%	100%	100%	100.00%	99%	100%	100%	
	<b>Rata-Rata Pencapaian Indikator Kinerja Pelayanan Sekretariat Daerah</b>		<b>82%</b>	<b>78%</b>	<b>79%</b>	<b>79%</b>		<b>86%</b>	<b>82%</b>	<b>86%</b>	<b>86%</b>	

### **2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Sekretariat Daerah**

Sekretariat Daerah Kabupaten Enrekang adalah unsur utama Pemerintah Kabupaten Enrekang dalam melaksanakan pembangunan dan Kemasyarakatan yang dipimpin oleh seorang Sekretaris Daerah dan bertanggungjawab kepada Bupati. Sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi, Sekretariat yaitu membantu Bupati dalam menyusun Kebijakan dan mengkoordinasikan dinas daerah dan lembaga teknis daerah serta melaksanakan tugas sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Realisasi pencapaian kinerja kegiatan Sekretariat Daerah dari tahun ketahun cenderung stabil dan dapat dikategorikan berhasil yaitu capaian antar 80 – 100%. Namun disadari bahwa masih terdapat kegiatan yang tidak terealisasi sesuai dengan target yang diharapkan, hal ini terjadi karena beberapa paktor diantaranya Anggaran yang tidak mencukupi untuk membiayai kegiatan dan faktor eksternal lainnya.

Dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat Sekretariat Daerah telah menetapkan indikator kinerja kunci (IKK) sebagai variabel indikator dalam menilai tingkat keberhasilan pelayanan Sekretariat Daerah sesuai tugas pokok dan fungsinya dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Dari 43 indikator yang telah ditetapkan dengan target rata-rata 83 - 100%, Pada umumnya sudah tercapai yang sesuai target setiap tahunnya, namun disadari masih perlu perbaikan-perbaikan untuk lebih menyempurnakan pelayanan yang diberikan kepada masyarakat.

### **2.4. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat**

Pada awal tahun 2017 telah dilaksanakan penjaringan usulan program dan kegiatan dimasyarakat melalui musrenbang tingkat Desa, Kecamatan dan Kabupaten. Hal ini dilaksanakan untuk menjaring usulan program dan kegiatan dari masyarakat demi meningkatkan perbaikan pelayanan pemerintah utamanya di Sekretariat Daerah.

Demikian halnya usulan yang disampaikan melalui pengaduan masyarakat, LSM maupun organisasi masyarakat lainnya baik secara langsung maupun melalui pengaduan secara on line akan ditelaah secara rasional untuk ditindak lanjuti dalam bentuk usulan program dan kegiatan ditahun 2018.

Adapun usulan program dan kegiatan dari pemangku kepentingan yang akan dilaksanakan di tahun 2018 dapat digambarkan pada tabel berikut ini :

TABEL 2.3

## USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN DARI PEMANGKU KEPENTINGAN TAHUN 2018

No	Urusan, /Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program /Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program(outcome)/Kelgiatan (Output)	Target Capaian	Catatan Penting
1	2	3	4	5	8
<b>I</b>	<b>Program Upaya Peningkatan Kesehatan Masyarakat</b>		<b>Terwujudnya Peningkatan Kesehatan Masyarakat</b>	<b>60 %</b>	
1	Pembinaan sekolah sehat	3 Kec	Terbinanya lingkungan sekolah yang sehat	7 Sekolah	
2	Advokasi dan sosialisasi Narkoba dan HIV/AIDS	Kab.Enrekang	Kelembagaan aktif dan dapat menanggulangi kasus narkoba dan HIV/AIDS	12 Kec	
3	Koordinasi dan Fasilitasi Komosi Pengendalian Zoonosi		Menurunnya Penyakit hewan yang menular ke manusia	60 %	
<b>II</b>	<b>Program Pengembangan Data dan Informasi</b>		<b>Adanya Publikasi Data dan Informasi standard harga,potensi daerah dan harga kebutuhan pokok masyarakat</b>	<b>83 %</b>	
<b>4</b>	Penyiaran dan pelaporan harga kebutuhan pokok dan barang strategis lainnya		Tersebaranya Informasi harga Kebutuhan pokok melalui Media Radio	<b>83 %</b>	
5	Pembuatan film dokumenter tentang profil, potensi, dan investasi daerah	Kabupaten	Jumlah film dokumenter yang dihasilkan		
6	Pembuatan baliho/ billboard	Kabupaten	Terlaksananya pembuatan baliho/billboard yang		

	potensi dan promosi daerah		dihasilkan		
7	Penyiaran dan pelaporan harga kebutuhan pokok dan barang strategis lainnya	Alla dan Enrekang	Tersebarnya Informasi harga Kebutuhan pokok melalui Media Radio	53 Kali Penyiaran	
<b>III</b>	<b>Program Perencanaan Pembangunan Daerah</b>		<b>Terpenuhinya pembangunan infrastruktur energy dan listrik</b>	1 Kali	
8	Koordinasi Penyusunan Kinerja Pemerintah Daerah	Kabupaten	Tersedianya dokumen penetapan kinerja pemerintah kab. Enrekang setiap tahun	1 Kali	
<b>IV</b>	<b>Peogram Pengembangan sistim Pelaporan, monhitoring/pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah</b>		<b>Terwujudnya pemerataan akses terhadap pendidikan berkualitas pada seluruh lapisan Masyarakat</b>	<b>100 %</b>	
9	Koordinasi Penyusunan LKPJ, LPPD, dan ILPPD	Kabupaten	Tersedianya laporan pelaksanaan pemerintahan	100 %	
10	Penyusunan Lakip Daerah	Kabupaten	Terwujudnya laporan pencapaian kinerja pemerintah kabupaten	1 Kali	
11	Peningkatan pengendalian administrasi perencanaan pembangunan	Kabupaten	Meningkatnya pengendalian administrasi pembangunan	85 %	
12	Peningkatan sistem informasi pengendalian operasional kegiatan (Teppa)	Kabupaten	Tersedinya dokumen pelaporan belanja APBD	12 Bln	
13	Pemantauan Monitoring terpadu kegiatan Fisik APBD	Kabupaten	Meningkatnya pengawasan pelaksanaan fisik pembangunan	12 Kec	
<b>VI</b>	<b>Program Pengendalian pencemaran dan pengrusakan lingkungan hidup</b>		<b>Terwujudnya peningkatan ketertiban dan keamanan di berbagai aspek kehidupan masyarakat</b>	<b>70 %</b>	
14	Koordinasi penyusunan AMDAL	5 Kec	Terciptanya koordinasi penyusunan AMDAL	5 Kali	
15	Pengawasan kegiatan penambangan bahan galian C	12 Kec	Meningkatnya pengawasan pelaksanaan kegiatan penambangan bahan galian C	12 Kali	
16	Koordinasi peran serta masyarakat terhadap pengendalian dan konservasi SDA	10 Kec	Terwujudnya koordinasi peningkatan peran serta masyarakat terhadap pengendalian dan	10 Kali	

			konservasi SDA		
17	Penertiban kegiatan penambangan rakyat	12 Kec	Meningkatnya pengawasan penertiban kegiatan penambangan rakyat	12 kec	
18	Monitoring, evaluasi dan pelaporan dampak kerusakan lingkungan	12 Kec	Terwujudnya monitoring, evaluasi dan pelaporan dampak kerusakan lingkungan akibat kegiatan pengolahan SDA.	12 Kec	
<b>VII</b>	<b>Program Perlindungan dan konservasi sumber daya alam</b>		<b>Adanya regulasi tentang pengelolaan sumber daya dan prekwensi koordinasi pengendalian SDA dan LH</b>	<b>12 Kec</b>	
19	Penyusunan regulasi tentang sumber daya alam	Kabupaten	Terwujudnya regulasi mengenai kegiatan sumber daya alam bidang pertambangan, pertanian, kehutanan, peternakan dan perikanan serta lingkungan hidup	1 Perda/Perbup	
20	Sosialisasi regulasi tentang sumber daya alam	Kabupaten	Meningkatnya pemahaman tentang regulasi SDA	150 Org	
21	Koordinasi tentang hasil produksi bidang pertambangan	12 Kec	Terwujudnya koordinasi tentang hasil produksi di bidang pertambangan	21 Kali	
22	Penyusunan perencanaan program pengendalian SDA dan lingkungan hidup	10 Kec	Terkoordinasinya perencanaan dan penyusunan program pembangunan pengendalian SDA dan lingkungan hidup	15 Kali	
23	Koordinasi tata kelola pemanfaatan SDA	12 Kec	Meningkatnya efektifitas dan efisiensi tata kelola pemanfaatan SDA bagi masyarakat	12 Kec	
24	Identifikasi dan inventarisasi obyek wisata alam	12 Kec	Terlaksananya identifikasi dan inventarisasi obyek dan daya tarik wisata alam khusus trekking, mendaki gunung, rekreasi air, dan wisata religius.	12 Kec	
<b>VIII</b>	<b>Program Peningkatan kualitas dan akses informasi sumber daya alam dan Lingkungan Hidup</b>		<b>Tingkat ketersediaan informasi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang dapat diakses oleh masyarakat</b>	60 %	
25	Pengadaan bahan informasi/data sumber daya alam dan LH	Kabupaten	Tersedianya pengadaan bahan informasi berupa data sumber daya alam dalam bentuk : buku, brosur, leaflet, poster, dll	100 Buah	
26	Penyebarluasan informasi sumber daya alam dan LH	Kabupaten	Tersebarluasnya informasi sumber daya alam melalui	1 Kali	

	melalui jaringan internet		jaringan internet		
27	Pembuatan Peta Potensi SDA dan LH	Kabupaten	Tersedianya peta potensi sumber daya alam di bidang pertambangan, pertanian, peternakan, perikanan dan kehutanan,	4 Buah	
28	Inventarisasi dan verifikasi unsure rupa bumi	Kabupaten	Terwujudnya data dan informasi yang akurat tentang unsure rupabumi	2 Unsur (alami dan buatan)	
<b>IX</b>	<b>Program penguatan kelembagaan dan pengarusutamaan Gender dan Anak</b>		<b>Jumlah organisasi wanita yang mendapatkan pembinaan</b>	<b>20 %</b>	
29	Pembinaan Potensi Organisasi dan Lembaga Masyarakat yang berperan dalam pemberdayaan perempuan dan anak	Kabupaten	Menurunnya angka tindak kekerasan perempuan dan anak	20 %	
<b>X</b>	<b>Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial.</b>		<b>Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial.</b>	<b>100 %</b>	
30	Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial Lainnya.	Kabupaten	Terwujudnya bantuan sosial kepada pengurus mesjid (Imam, Pembina TPA, Penyuluh Non PNS, dan Pencatat Nikah dan pelaksanaan open house idul fitri )	100 %	
<b>XI</b>	<b>Program Pembinaan Kesejahteraan Sosial Masyarakat</b>		<b>Prekuensi kegiatan pasilitasi dan pembinaan keagamaan</b>	<b>100 %</b>	
31	Pendidikan dan pelatihan Pembina TPA/Guru Mengaji	Kabupaten	Meningkatnya Kualifikasi Kompetensi Pembina TPA	50 Pembina TPA/Guru mengaji	
32	Pembinaan kerohaniaan lingkup Pemerintah Kabupaten Enrekang	Kabupaten	Meningkatnya Pemahaman Nilai-nilai Al-Quran sehingga tercapai PNS yang berkualitas IMTAG dan IPTEK	22 Kali	
33	Penyelenggaraan Pemberangkatan dan Pemulangan Jamaah Haji Kab. Enrekang.	Kabupaten dan Provinsi	Terwujudnya Kelancaran Penyelenggaraan Pemberangkatan dan Pemulangan Jamaah Haji Asal Kab. Enrekang.	2 Kali	
34	Pembinaan Kegiatan Keagamaan Islam Lainnya.	Kabupaten	Terwujudnya pelaksanaan kegiatan keagamaan	10 Kali	
35	Penyelenggaraan MTQ Tingkat Kabupaten Enrekang	Kabupaten	Terpilihnya Qari' dan Qariah Terbaik di Kabupaten Enrekang	23 Cabang Lomba	



36	Pelaksanaan MTQ Tingkat Provinsi	Provinsi	Terpilihnya Qari', Qariah, Mufassil dan hafiz yang mewakili Kab. Enrekang	23 Cabang Lomba	
37	Pelaksanaan STQ Tingkat Provinsi	Provinsi	Terpilihnya Qari', Qariah, Mufassil dan hafiz yang mewakili Kab. Enrekang		
38	Penyelenggaraan Festival Anak Saleh Tingkat Kabupaten	Kabupaten	Terpilihnya Hafidz-Hafidzah dan Mufasir-Mufasirah yang mewakili Kabupaten Enrekang di Arena FASi Tingkat Provinsi		
39	Pelaksanaan Safari Ramadhan	Kabupaten	Terwujudnya safari ramadan pemkab dengan Masyarakat Enrekang	12 Kec	
40	Koordinasi dan fasilitasi Bagian Kesejahteraan Rakyat	Provinsi	Terlaksananya koordinasi Bagian Kesra	12 Kali	
	<b>Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi</b>			9 Kali	
41	Penyelenggaraan pameran investasi dan Pembangunan		Terlaksananya Pameran Investasi dan Pameran Produk Unggulan UMKM	9 Kali	
42	Pelaksanaan koordinasi antar kabupaten/kota, propinsi terkait kebijakan koperasi	1 Paket	Terlaksananya Koordinasi Antar Kabupaten/Kota, Propinsi terkait kebijakan koperasi	30 UKM	
<b>XII</b>	<b>Program Peningkatan Peran serta Kepemudaan</b>		<b>Jumlah generasi muda/pemuda berprestasi yang dibina</b>	<b>25 Kali</b>	
43	Koordinasi Pembinaan Generasi Muda/Pemuda Berprestasi	Kabupaten	Terwujudnya koordinasi Pembinaan Terhadap Generasi Muda/Pemuda Berprestasi	25 Kali	
<b>XIII</b>	<b>Program peningkatan sarana dan prasarana olah raga</b>		<b>Jumlah pasilitas olah raga yang dikelola dan ditangani secara operasional dan pemeliharaan</b>	<b>85 %</b>	
44	Pemeliharaan rutin/berkala Sarana Prasarana Olahraga	Kabupaten	Pemeliharaan rutin/berkala Sarana Prasarana Olahraga	3 Unit	
<b>XIV</b>	<b>Program pengembangan wawasan kebangsaan</b>		<b>Terwujudnyan pemberdayaan kelompok masyarakat dalam menjaga keamanan</b>	12 Klp	

			<b>lingkungan</b>		
45	Koordinasi Pembinaan Masyarakat Tentang Wawasan Kebangsaan	Kabupaten & 12 Kecamatan	Meningkatnya koordinasi Pembinaan tentang Peningkatan Wawasan Lingkungan/ Kebangsaan	20 X Koordinasi	
46	Koordinasi Pembinaan Keamanan & Ketertiban serta Perlindungan Masyarakat	Kabupaten & 12 Kecamatan	Meningkatnya koordinasi Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	30 X Koordinasi	
47	<a href="#">Koordinasi dan pemantauan pelaksanaan pemilihan umum</a>	12 Kecamatan	<a href="#">Terwujudnya pelaksanaan Pemilu yang LUBER</a>	1 Kali	
<b>XV</b>	<b>Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan</b>		<b>Terwujudnya pemberdayaan kelompok masyarakat dalam menjaga keamanan lingkungan</b>	<b>30 X Koordinasi</b>	
48	Koordinasi pelaksanaan pemantauan kegiatan politik	Kabupaten & 12 Kecamatan	Terwujudnya Koordinasi pelaksanaan pemantauan kegiatan politik	30 Kali	
49	Koordinasi penguatan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pedesaan	Kabupaten & 12 Kecamatan	Terwujudnya Koordinasi Kelembagaan dan Organisasi Masyarakat Pedesaan	30 Kali	
<b>XVI</b>	<b>program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah / wakil kepala daerah</b>		<b>program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah / wakil kepala daerah</b>	100 %	
50	Dialog/Audensi KDH/WKDH dengan Tokoh Masyarakat dan pimpinan /anggota Organisasi Masyarakat	Kabupaten	Terjalannya komunikasi antara BKDH/WKDH dengan Tokoh Masyarakat	100 %	
51	Rapat koordinasi pejabat pemerintah daerah	Kabupaten	Terwujudnya koordinasi antar pejabat pemerintah daerah	100 %	
52	Kunjungan kerja / inspeksi kepala daerah / wakil kepala daerah	Kabupaten	Terwujudnya pengawasan KDH/WKDH	100 %	
53	Koordinasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah lainnya	Pempus Pemprov Kabupaten	Meningkatnya dengan pemerintah pusat dan pemda lainnya	100 %	
54	Rapat Kerja Daerah	Kabupaten	Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang lebih efektif dan efisien	100 %	
55	Peningkatan operasional rumah tangga kepala daerah / wakil kepala daerah	Kabupaten	terpenuhinya operasional rumah tangga Bupati dan Wakil Bupati	100 %	

56	Penerimaan tamu-tamu pemda	Kabupaten	Meningkatnya pelayanan tamu-tamu pemda	100 %	
<b>XVII</b>	<b>Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah</b>		<b>Tingkat kesesuaian paket regulasi pengelolaan keuangan daerah dengan regulasi pemerintah pusat</b>	100 %	
57	Penyusunan standar harga satuan barang dan jasa	Kabupaten	Terwujudnya pedoman Standarisasi Harga Barang dan Jasa	100 Buku	
58	Unit layanan pengadaan barang dan jasa	Kabupaten	Terlaksananya sistim pelelangan Barang dan Jasa	100 %	
59	Peningkatan Manejemen dan Pelayanan Pengelolaan administrasi asset/Barang Daerah	Kabupaten	Tersedianya laporan Administrasi Asset/Barang secara terkendali	100 %	
60	Pengendalian Pengawasan, Pengawasan, Pemantauan dan monitoring asset/barang daerah	Kabupaten	Tersedianya laporan Adm penggunaan asset/barang daerah secara terkendali	100 %	
61	Rekonsiliasi laporan realisasi asset/barang daerah per SKPDTA2018	Kabupaten	Tersedianya data realisasi asset/barang daerah per SKPD	100 %	
62	Inventarisasi dan Penertiban Masalah Pertanahan dalam wilayah Kabupaten Enrekang	Kabupaten	Terlaksananya Inventarisasi dan Penertiban Masalah Pertanahan dalam wilayah Kabupaten Enrekang	100 %	
63	Rekonsiliasi dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan	Kabupaten & Provinsi	Terlaksananya rekonsiliasi kegiatan pemda	16 Kegiatan	
64	Koordinasi Pengelolaan Adm. Keuangan	Kabupaten	Meningkatnya Koordinasi Pengelolaan Adm. Keuangan Daerah	12 Bln	
65	Pengelolaan pelaporan inventarisasi asset/barang daerah	Kabupaten	Tersedianya laporan inventarisasi Asset/Barang Daerah	12 Bulan	
66	Penghapusan asset/barang milik daerah	Kabupaten	Tersedianya barang/Asset Daerah yang akan dihapus	100 %	
67	Penyusunan Neraca Asset	Kabupaten	Tersedianya data penyusunan neraca	100 %	
68	Pengsertifikatan Tanah Milik Pemda	Kabupaten	Terwujudnya Pengsertifikatan Tanah Milik Pemda	100 %	
69	Penyusunan RKBMD pengadaan dan RKBMD Penyusunan RKBD Pemeliharaan	Kabupaten	RKBMD Pengadaan dan RKMBD pemeliharaan	100 %	

70	Penilaian dan penafsiran asset	Kabupaten	Terlaksananya penilaian barang milik daerah	100 %	
<b>XVII I</b>	<b>Program Peningkatan Sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH</b>		<b>Tingkat Penyelesaian /tindak lanjut hasil temuan pemeriksaan</b>	95 %	
71	Tindak lanjut hasil temuan pengawasan	Pempus Pemprov	Meningkatnya tindak lanjut atas temuan aparat pengawasan Inspektorat Kabupaten, Inspektorat Provinsi, BPKP, dan BPK	70 Temuan	
72	Koordinasi Penyampaian Laporan Hasil kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN)	Pempus	Meningkatnya ketaatan penyelenggara negara dalam menyampaikan laporan harta kekayaannya	50 %	
73	Pengembangan analisis dan penelahan kebijakan daerah	Pempus dan Provinsi	Terwujudnya Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan KDH	80 %	
<b>XVII II</b>	<b>Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan</b>		<b>Jumlah SKPD yang ditetapkan sebagai zona integritas</b>	5 SKPD	
74	Penetapan zona integritas Pemda	Kabupaten	Tesedianya zona integritas	2 SKPD	
75	Monitoring dan pelaporan pelaksanaan percepatan pemberantasan korupsi	Kabupaten	Terwujudnya laporan percepatan pemberantasan korupsi	1 Kali	
76	Monitoring dan evaluasi pelaksanaan pakta integritas pemda	Kabupaten	Meningkatnya pelaksanaan fakta integritas	1 Kali	
<b>XX</b>	<b>Program Peningkatan kerjasama antar pemerintah Daerah</b>		<b>Jumlah dokumen perjanjian kerjasama pemda dengan daerah (lembaga lainnya)</b>	10 MOU	
77	Pelaksanaan Koordinasi antar kabupaten	Provinsi & antar Kabupaten	Terwujudnya Koordinasi Antar Kabupaten/Kota, Propinsi & Luar Propinsi	35 Kali	
78	Koordinasi antara pemda dengan APKASI	Provinsi & Pusat	Terwujudnya Koordinasi antara Pemda dengan Asosiasi Pemkab Seluruh Indonesia ( APKASI )	80 %	
<b>XXI</b>	<b>Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan</b>		<b>% realisasi prolegda yang ditetapkan menjadi perda</b>	8 Perda	

79	Legislasi rancangan peraturan perundang-undangan	Kabupaten	Perda berdasarkan Program Legislasi Daerah	85 %	
80	Pelembaran daerah dan dokumentasi produk hukum daerah	Kabupaten	Terwujudnya penatausahaan produk perundang-undangan	10 perda 30 perbup,700 kepub	
81	Evaluasi dan Perumusan Kebijakan Daerah	Kabupaten	Tersedianya produk hukum daerah sesuai kebutuhan	10 perda 30 perbup,700 kepub	
<b>XXII</b>	<b>Program Penataan Daerah Otonomi Baru</b>		<b>Jumlah kecamatan dan desa yang dimekarkan</b>	1 Kec, 5 Desa/Kel	
82	Pasilitasi percepatan penyelesaian tapal batas wilayah administrasi antar daerah	Kec/Desa/Kel	Meningkatnya pengamanan batas wilayah kabupaten dan Kecamatan	10 Patok	
83	Pemekaran wilayah kecamatan dan Desa/Kelurahan	Kec/Desa/Kel	Meningkatnya pelayanan kepada masyarakat	1 Kec, 5 Desa/Kel	
84	Penyusunan laporan evaluasi kemampuan penyelenggaraan Otonomi daerah	Kabupaten	Terwujudnya laporan kesejahteraan dan pemerataan ekonomi	1 Laporan	
85	Sosialisasi dan publikasi peta batas Daerah Antar Kabupaten dan batas wilayah dalam Kabupaten	Kabupaten	Terlaksananya sosialisasi dan publikasi peta batas daerah antar Kabupaten dan batas wilayah dalam kabupaten	12 Kecamatan	
<b>XXII I</b>	<b>Program Peningkatan Pengelolaan Administrasi dan Kelembagaan Pemerintah Daerah</b>		<b>Tingkat pelaksanaan sistim pengendalian administrasi pemerintahan, kepegawaian, pembangunan dan administrasi umum pemda</b>	80 %	
86	Pembinaan Koordinasi Administrasi Kepegawaian dan Pemerintahan	Kabupaten	Terlaksananya Pembinaan dan Koordinasi Kepegawaian dan Pemerintahan	12 Bulan	
87	Pembinaan dan Koordinasi Administrasi Pemerintahan	Kabupaten	Terlaksananya Pembinaan dan Koordinasi Adm. Pemerintahan	12 Bulan	
88	Pembinaan dan Koordinasi Administrasi Pembangunan	Kabupaten	Terlaksananya Pembinaan dan Koordinasi Adm.	12 Bulan	

			Pembangunan		
89	Pembinaan dan Koordinasi Administrasi umum dan Kepegawaian	Kabupaten	Terlaksananya Pembinaan dan Koordinasi Adm. Umum dan Kepegawaian	12 Bulan	
90	Sosialisasi Standar Pelayanan Minimum	Kabupaten	Meningkatnya pelaksanaan SPM	1 Kali	
91	Pembinaan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)	12 Kecamatan	Proses pelayanan yang cepat, tepat dan akuntabel di tingkat kecamatan	100 %	
92	Pembinaan dan Penataan Administrasi Kecamatan	12 Kec	Tingkat kemampuan aparaturnya kecamatan dalam penataan adm. Kecamatan	100 %	
93	Koordinasi, konsultasi dan Pembinaan Adm Pemerintahan	Provinsi	Terwujudnya pengelolaan Adm Pemerintahan yang baik	90 %	
<b>XXI V</b>	<b>Program Peningkatan pelayanan pengadaan dan pembinaan penyedia barang dan jasa</b>		<b>Cakupan implementasi sistim pengadaan barang dan jasa secara elektronik</b>	80 %	
94	Unit layanan pengadaan barang dan jasa	Kabupaten	Meningkatnya kualitas pengadaan barang dan jasa	43 SKPD	
95	Penunjang pelaksanaan ULP	Kabupaten	Meningkatnya kinerja ULP	1 Paket	
96	Pelaksanaan Layanan Pengadaan secara elektronik ( LPSE)	Kabupaten	Terwujudnya pelayanan barang dan jasa yang efisien, efektif, transparan dan terbuka	43 SKPD	
97	Pemeliharaan website LPSE	Kabupaten	Jumlah sarana LPS dalam konsisi baik	1 Set	
98	Pelaksanaan pelelangan /pengadaan barang dan jasa	Kabupaten	Terwujudnya pelelangan dan pengadaan barang dan jasa	1 Kali	
99	Pembinaan Penyedia Jasa Konstruksi	Kabupaten	Meningkatnya kualitas penyedia jasa konstruksi yang berdaya saing tinggi	146 Prsh	
100	Penyusunan profil perusahaan penyedia barang dan jasa		Tersedianya buku data perusahaan penyedia	146 Prsh	

		Kabupaten	barang dan jasa		
101	Pelaksanaan penerbitan surat izin usaha jasa konstruksi	Kabupaten	Terpantaunya perusahaan penyedia barang dan jasa yang ada dikab. Enrekang	146 Prsh	
<b>XXV</b>	<b>Program Pengelolaan dan Pengembangan Asset Pemerintah Daerah</b>		<b>% Asset pemda yang terinventarisir dan memenuhi standar administrasi</b>	<b>90 %</b>	
102	Penataan dan Pembebasan Tanah Perkotaan/Perdesaan	Pusat/Provinsi /Kab/Kec	Tersedianya Lahan untuk Kepentingan Umum	100 %	
103	Inventarisasi dan Penertiban Masalah Pertanahan dalam wilayah Kabupaten Enrekang	12 Kecamatan	Tertibnya Asset Pemda	100 %	
104	Pemetaan dan penetapan tanah objek reforma agrarian di Kab. Enrekang	Kabupaten	Tersedianya data area tanah di luar kawasan yang dapat dimanfaatkan masyarakat	50 %	
	<b>Program Pengembangan Ketatalaksanaan Pemerintah Daerah</b>		<b>Tingkat penerapan regulasi dan pedoman tatalaksana penyelenggaraan pemerintahan daerah</b>	85 %	
105	Penataan kelembagaan Pemda	Kabupaten	Terwujudnya kelembagaan yang ideal berdasarkan peraturan yang berlaku	85 %	
106	Penyusunan Tatanaskah Dinas	Kabupaten	Tersedianya pedoman tatanaskah dinas daerah	100 %	
107	Penataan Administrasi Kependidikan Setda	Kabupaten	Meningkatnya penataan adm. Kependidikan di Setda	100 %	
108	Penyusunan Buku Kerja Pemerintah Daerah	Kabupaten	Terwujudnya pedoman dalam rangka rapat kerja	100 %	
109	Koordinasi, Konsultasi ketatalaksanaan, kelembagaan dan kepegawaian	Pempus, Provinsi & Kab. Lainnya	Meningkatnya koordinasi bidang kelembagaan dengan Pemprop dan Pempus	20 Kali	
110	Penataan data Struktur Organisasi Pemda	Kabupaten	Tersedianya informasi struktur Pemda	100 %	
111	Penyusunan Peraturan-peraturan yang terkait ketatalaksanaan	Kabupaten	Meningkatnya produk ketatalaksanaan	100 %	
112	Penyusunan TUPOKSI	Kabupaten	Terwujudnya Perbup tentang Tupoksi Jabatan Pemda	100 %	

113	Lomba Unit Pelayanan Publik	Kabupaten & Provinsi	Terpilihnya SKPD yang mewakili Kab. Dalam lomba UPB di tingkat Prop/Pusat	100 %	
114	Penyusunan Laporan Pencapaian SPM	Kabupaten	Tersedianya laporan pencapaian SPM di daerah	2 Kali	
115	Penyusunan SOP SKPD	Kabupaten	Terwujudnya SOP bagi SKPD	50 %	
116	Penyusunan IKM	Kabupaten	Terwujudnya Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	50 %	
<b>XXV I</b>	<b>Program Penanganan/perlindungan hukum dan pembinaan kesadaran hukum/HAM</b>		<b>1. % Penyelesaian permasalahan Hukum Pemda 2. Jumlah kelompok masyarakat sadar hokum</b>	<b>100 %</b>	
117	Pemberian Bantuan Hukum	Kabupaten	Tingkat Penyelesaian Permasalahan Perdata dan TUN	100 %	
118	Penyuluhan Hukum dan Sosialisasi Perda	Kab dan 12 Kec	Persentase pelaksanaan penyuluhan hukum dan sosialisasi perda	12 Kali	
119	Pembinaan Desa Sadar Hukum/Kelompok Sadar Hukum	3 Kec	Meningkatnya kesadaran hukum masyarakat	5 Klp	
120	Pelaksanaan RANHAM	Kabupaten	SKPD memiliki program Pro HAM	100 %	
<b>XXV II</b>	<b>Program pengembangan komunikasi, informasi, dan media massa</b>		<b>% data dan informasi kegiatan pemda yang dipublikasikan kepada masyarakat</b>	<b>80 %</b>	
121	Peningkatan pelayanan sandi	Kabupaten	Meningkatnya pelayanan adm. persandi dan persuratan lainnya	100 %	
122	Pelaksanaan publikasi dan dokumentasi pemda	Kabupaten	Masyarakat dapat mengetahui informasi tentang pembangunan daerah melalui media cetak dan elektronik dan tersedianya dokumentasi daerah	100 %	
123	Pelaksanaan jumpa pers Pemda	Kabupaten	Meningkatnya pemahaman masyarakat tentang pelaksanaan pembangunan dan pengembangan potensi daerah	100 %	



124	Pelayanan pengaduan SMS Center	Kabupaten	Tersedianya media on line masyarakat dalam menyampaikan pengaduannya	100 %	
125	Pengadaan sarana telekomunikasi Setda	Kabupaten	Meningkatnya pemanfaatan jaringan internet di Setda	3 Bagian	
<b>XXV III</b>	<b>Program Peningkatan Produksi Pertanian / Perkebunan</b>		<b>Total produksi komoditi tembakau</b>	<b>80 %</b>	
126	Peningkatan kualitas produksi tembakau	Kec. Curio	Meningkat kuantitas dan Kualitas Tembakau	110 Org Petani	
<b>XXI X</b>	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>		<b>Terwujudnya pelayanan Administrasi Kantor</b>	<b>90 %</b>	
127	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air, dan listrik	Kabupaten	Terwujudnya pelayanan komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 bulan	
128	Penyediaan jasa jaminan pemeliharaan kesehatan Bupati dan Wakil Bupati	Kabupaten	Terjaminnya tingkat kesehatan Bupati dan wakil Bupati	2 Kali	
129	penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Kabupaten	Terwujudnya penerangan bangunan kantor	12 Bln	
130	rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Pemprov & Pempus	Terwujudnya koordinasi dan konsultasi keluar daerah	12 Bln	
131	koordinasi, konsultasi dalam daerah dan peninjauan lapangan	12 Kec	Terwujudnya koordinasi dalam daerah dan peninjauan lapangan	12 Bln	
132	penyediaan bahan bakar minyak mesin/kendaraan operasional kantor	Kabupaten	Terwujudnya operasional kendaraan dinas	Bulan	
133	Penyediaan peralatan kebersihan dan perlengkapan dapur kantor	Kabupaten	Tersedianya peralatan kebersihan dan perlengkapan dapur kantor	12 Bulan	
134	peningkatan pelayanan mess pemda di jakarta	Jakarta	Terwujudnya pelayanan mess pemda di Jakarta	12 Bln	
135	penataan halaman dan penataan lapangan upacara	Kabupaten	Kondisi kantor bupati indah dan asri	2 Unit	
136	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Kabupaten	Tersedianya bahan bacaan baik buku, korn, majalah, bulletin dan media cetak lainnya	30 Media	

137	Pelaksanaan pelayanan keprotokolannya pemda	Kabupaten	Terpenuhinya pelayanan keprotokolannya pemerintah daerah dan masyarakat yang beretika	100 %	
138	Pengelolaan Adm Keuangan	Kabupaten	Terwujudnya pengelolaan Adm Keuangan dan perkantoran yang efektif	12 Bulan	
139	Pelaksanaan Verifikasi Keuangan	Kabupaten	Cakupan pelaksanaan verifikasi SPJ keuangan setda	12 Bulan	
140	Penyusunan Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan	Kabupaten	Tersedianya laporan realisasi fisik dan keuangan kegiatan pembangunan	41 Esp	
141	Pelaksanaan pelelangan/pengadaan barang dan jasa	Kabupaten	Terlaksananya pelelangan dan pengadaan barang dan jasa	100 %	
<b>XXX</b>	<b>Program Peningkatan Sarana dan prasarana Aparatur</b>		<b>Terwujudnya sarana dan prasarana aparatur yang memadai</b>		
142	pengadaan kendaraan dinas / operasional	Kabupaten	Meningkatnya kendaraan operasional yang diadakan	17 Unit	
143	Pengadaan peralatan Gedung kantor	Kabupaten	Meningkatnya peralatan kantor yang diadakan	95 %	
144	Pengadaan sarana dan prasarana aparatur	Kabupaten	Terlaksananya pengadaan sarana dan prasarana aparatur	95 %	
145	pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan	Kabupaten	Kondisi rumah jabatan Bupati, Wakil Bupati dan Sekda baik	95 %	
146	pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas	Jakarta	Kondisi mess pemda di jakarta baik dan nyaman	95 %	
147	pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Kabupaten	Terwujudnya kantor bupati yang refresentatif	95 %	
148	pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Kabupaten	kendaraan dinas Bupati, Wakil Bupati dan Sekda dalam kondisi baik	95 %	
149	pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan rumah jabatan/dinas	Kabupaten	perlengkapan rumah jabatan Bupati, Wakil Bupati dan Sekda dalam kondisi baik	95 %	
150	pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Kabupaten	peralatan gedung kantor dalam kondisi baik	95 %	

151	pemeliharaan rutin/berkala peralatan studio dan komunikasi	Kabupaten	Alat-alat studio dan komunikasi dalam kondisi baik	95 %	
152	pengadaan perlengkapan / peralatan rumah jabatan bupati	Kabupaten	Meningkatnya jumlah perlengkapan rumah jabatan	95 %	
153	pengadaan perlengkapan / peralatan rumah jabatan wakil bupati	Kabupaten	Meningkatnya perlengkapan / peralatan rumah jabatan wakil bupati	95 %	
154	pengadaan perlengkapan / peralatan rumah jabatan sekda	Kabupaten	Meningkatnya perlengkapan/ peralatan rumah jabatan sekda	95 %	
<b>XXX I</b>	<b>Program Peningkatan Disiplin Aparatur Pemda</b>		<b>Meningkatnya kedisiplinan Aparatur Pemda</b>	<b>85 %</b>	
155	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Kabupaten	Meningkatnya kedisiplinan dalam berpakaian dinas	100 %	
156	Koordinasi Penegakan Disiplin Aparatur	Kabupaten	Terwujudnya koordinasi pelaksanaan penegakan disiplin aparatur	100 %	
157	Sosialisasi Peraturan tentang Disiplin PNS	Kabupaten	Meningkatnya pengetahuan aparatur terhadap Peraturan Kedisiplinan	100 %	
158	Pengadaan sarana absensi elektronik		Meningkatnya kedisiplinan Aparatur terhadap jam kerja pegawai	1 Kali	
159	Sosialisasi Peraturan tentang pengelolaan barang milik daerah	Kabupaten	Terlaksananya sosialisasi pengelolaan barang milik daerah	100 %	
<b>XXX II</b>	<b>Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur</b>		<b>Meningkatnya kapasitas jumlah PNS yang mengikuti Diklat teknis setiap tahun</b>	<b>33 Orang</b>	
160	Diklat Tehnis Tugas dan fungsi bagi PNS	Provinsi & Luar Provinsi	Tingkat pengetahuan PNS dalam menjalankan tugas pokok	95 %	
161	Pemberian penghargaan bagi PNS berprestasi	Kabupaten	Terwujudnya apresiasi bagi PNS yang berprestasi	3 Org	
162	Diklat keprotokolan	Kabupaten	Meningkatnya jumlah	100 %	

		Provinsi Pusat	tenaga keprotokolan		
163	Sosialisasi paket regulasi tentang pengelolaan keuangan daerah	Kabupaten	Meningkatnya pemahaman tentang regulasi pengelolaan keuangan	1 Kali	
164	Bintek implementasi paket regulasi tentang pengelolaan keuangan daerah	Kabupaten	Meningkatnya pemahaman aparatur terhadap pengelolaan keuangan daerah	150 Org	
165	Peningkatan sumber daya melalui kegiatan promosi dan investasi pembangunan	Kabupaten	Meningkatnya wawasan dan pengetahuan aparatur yang mengikuti kegiatan promosi pembangunan setiap tahun	7 Orang	
166	Pembinaan tenaga teknis pelaksanaan pembangunan	Kabupaten	Meningkatnya kompetensi PPK, PPTK dan Pengawas lapangan	43 SKPD	
167	Diklat dan sosialisasi pengadaan barang dan jasa	Kabupaten	Meningkatnya jumlah PNS yang memiliki sertifikat pengadaan barang dan jasa	140 Org	
168	Bintek pengelolaan keuangan daerah dan barang milik daerah	Kabupaten	Terwujudnya aparatur yang terampil dalam pengelolaan Barang Daerah	150 Orang	
169	Peningkatan Sumber daya melalui kegiatan promosi dan investasi pembangunan	Kabupaten	Meningkatnya wawasan dan pengetahuan aparatur yang mengikuti kegiatan promosi pembangunan setiap tahun	90 %	
170	Pengembangan kapasitas aparatur dan Tim Pembakuan Nama Rupa Bumi	Kabupaten	Terlaksananya peningkatan kapasitas aparatur dan Tim Pembakuan Nama Unsur Rupabumi di Kab. Enrekang	2 Orang	
171	Bintek Penyusunan laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Kabupaten	Terwujudnya aparatur yang terampil dalam menyusun LPPD	120 Orang	
<b>XXX III</b>	<b>Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan</b>		<b>Terwujudnya laporan capaian kinerja pemerintah dan keuangan</b>	95 %	
172	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kabupaten	Terwujudnya laporan pencapaian kinerja sekretariat daerah	100 %	
173	Penyusunan Laporan Keuangan bulanan, Triwulan dan	Kabupaten	Terwujudnya laporan perkembangan realisasi	%100	

	Semesteran		keuangan triwulan		
<b>XXX IV</b>	<b>Program sinkronisasi perencanaan dan penganggaran SKPD</b>		<b>Terwujudnya sinkronisasi antara perencanaan daerah dengan perencanaan SKPD</b>	70 %	
174	Penyusunan RKA-SKPD	Kabupaten	Terwujudnya RKA Setda	1 Kali	
175	Penyusunan DPA-SKPD	Kabupaten	Terwujudnya DPA Setda	1 Kali	
176	Penyusunan Rencana Kerja SKPD	Kabupaten	Terwujudnya dokumen perencanaan kerja Setda	1 Kali	
177	Penyusunan Renstra	Kabupaten	Terlaksananya penyusunan Rencana Strategis Setda	1 Kali	

### **BAB III**

#### **TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN**

##### **3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional**

Searah kebijakan Pembangunan Nasional tahun 2018, khususnya Peningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat, Pemerintah Kabupaten Enrekang telah membentuk Tim Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Secara Elektronik melalui Keputusan Bupati Enrekang Nomor 129/Kep/II/2011 tanggal 14 Pebruari 2011 sebagai tindak lanjut dari Perpres Nomor 54 Tahun 2010.

Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) dibentuk guna mewujudkan harapan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa pemerintah secara elektronik. Hal ini dilakukan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat khususnya pengusaha dalam penyediaan barang dan jasa pemerintah secara efisien dan efektif dan merupakan salah satu bagian yang penting dalam perbaikan pengelolaan keuangan Negara untuk menuju pemerintahan yang bersih (clean Government).

Demikian halnya dengan Unit Layanan Pengadaan (ULP) dibentuk untuk mengatur mengenai tata cara pengadaan barang dan jasa yang sederhana, jelas konprehensif sesuai tata kelola yang baik sehingga dapat menjadi pengaturan yang efektif bagi para pihak terkait dengan pengadaan barang dan jasa.

Berdasarkan peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM). Peraturan Pemerintah tersebut mewajibkan Kementerian dan lembaga untuk menyusun Standar Pelayanan Minimal (SPM) untuk memenuhi pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib pemerintah daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal.

Dalam penerapannya Pemerintah Daerah diwajibkan untuk melaksanakan target pencapaian yang ada dalam SPM masing-masing kementerian/lembaga kemudian memonitor dan melaporkan pelaksanaannya kepada pemerintah pusat.

Untuk melihat kebijakan nasional yang diprogramkan dalam kegiatan 2018 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

TABEL NO 3.1  
IDENTIFIKASI KEBIJAKAN NASIONAL DAN PROVINSI  
KANBUPATEN ENREKANG

No	Kebijakan Nasional/Provinsi	Sumber	Keterangan
1	2	3	4
<b>A.</b>	<b>Nasional</b>		
1	Pembakuan Nama Rupabumi	RPJM Nasional	
2	Pemetaan dan penataan batas wilayah Kab. Enrekang	RPJM Nasional	
3	Layanan Pengadaan secara Elektronik (LPSE)	RPJM Nasional	
4	Unit Layanan pengadaan (ULP) Kab. Enrekang	RPJM Nasional	
5	Diklat Teknis dan koordinasi Tugas PNS Tim Layanan Pengadaan secara Elektronik (LPSE)	RPJM Nasional	
6	Diklat Teknis dan koordinasi Tugas PNS Tim Unit Layanan Pengadaan (ULP)	RPJM Nasional	
7	Monitoring Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) oleh SKPD	RPJM Nasional	
8	Koordinasi penyampaian laporan Hasil Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN)	RPJM Nasional	
9	Koordinasi, Monitoring dan Penyusunan Laporan Perkembangan Percepatan Pemberantasan Korupsi	RPJM Nasional	
10	Penyusunan Lakip Daerah	RPJM Nasional	
11	Penyusunan Penetapan Kinerja Pemerintah	RPJM Nasional	
12	Restrukturisasi Organisasi Kelembagaan Pemerintah Daerah	RPJM Nasional	
13	Peningkatan kualitas bahan baku tembakau	RPJM Nasional	
14	Monitoring dan evaluasi capaian kinerja SKPD se Kab. Enrekang	RPJM Nasional	
15	Monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan pakta integritas di pemerintahan kab. Enrekang	RPJM Nasional	
16	Penilaian Kinerja Pemerintah dan Unit Pelayanan Publik Tingkat Kabupaten	RPJM Nasional	
17	Penilaian kinerja pemerintah daerah	RPJM Nasional	

18	Monitoring Pelaksanaan zona integritas	RPJM Nasional	
19	Sosialisasi PP No. 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil	RPJM Nasional	
20	Penyusunan rencana aksi LHKPN	Kebijakan Nasional	
21	Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara		
<b>B.</b>	<b>Provinsi</b>		

### 3.2. Tujuan dan sasaran

Secara umum rencana kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Enrekang T.A. 2018 dimaksudkan untuk menterjemahkan RPJMD berdasarkan visi, misi, strategi, kebijakan, program pelayanan SKPD sesuai dengan tugas pokok dan fungsi/ tupoksi sekretariat daerah. Tujuan penyusunan rencana kerja Sekretariat Daerah T.A. 2018 dimaksud adalah :

1. Meningkatkan sinergitas kebijakan pemerintah pusat, propinsi, daerah dan antar SKPD.
2. Meningkatkan kemampuan Sumber daya aparatur dalam pelayanan administrasi.
3. Meningkatkan kualitas, kuantitas produk hukum daerah.
4. Meningkatkan akses teknologi dan informasi untuk mendukung pelayanan publik.

Demikian pula halnya dengan sasaran organisasi yang merupakan pernyataan tentang hal-hal yang diharapkan oleh setiap unit organisasi dalam peranannya terhadap pencapaian misi dan visi organisasi yang telah ditetapkan. Berdasarkan uraian tersebut, maka sasaran dalam rencana kerja sekretariat daerah Kabupaten Enrekang T.A. 2018 adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya sinergitas kebijakan pemerintah pusat, propinsi, daerah, dan antar SKPD.
2. Meningkatnya kemampuan sumber daya aparatur dalam pelayanan administrasi.
3. Meningkatnya kualitas dan kuantitas produk hukum.
4. Meningkatnya pemamfaatan teknologi dan informasi dalam mendukung pelayanan publik.



### **3.3. Program dan Kegiatan Prioritas Serta Indikator Kinerja Sekretariat Daerah**

Tahun Anggaran 2018 Sekretariat Daerah telah menyusun Program dan kegiatan prioritas beserta indikator kinerja sebanyak 35 Program dan 177 Kegiatan dengan jumlah rencana anggaran sebesar **Rp. Rp.23.009.000.000,-** dan perkiraan maju ditahun anggaran 2019 sebesar **Rp.25.309.900.000,-** untuk jelasnya dapat diperlihatkan pada tabel 3.3

TABEL 3.2  
RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN  
SEKRETARIAT DAERAH TAHUN 2018  
DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 2019

No	Urusan, /Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program /Kegiatan	Indikator Kinerja Program(outcome)/Kelgiatan (Output)	Rencana Tahun 2018				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2019	
			Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.000)	Sumber Dana		Target Capain Kinerja	Kebutuhan Dana /Pagu Indikatif (Rp.000)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>URUSAN WAJIB</b>								
	<b>Urusan Kesehatan</b>								
<b>I</b>	<b>Program Upaya Peningkatan Kesehatan Masyarakat</b>	<b>Terwujudnya Peningkatan kesehatan masyarakat</b>		<b>60%</b>	<b>60,807</b>	APBD		<b>60%</b>	<b>60,807</b>
<b>1</b>	Pembinaan Sekolah Sehat	Terbinanya lingkungan sekolah yang sehat	Kab. Enrekang	7 Sekolah	22,500	APBD		7 Sekolah	24,750
<b>2</b>	Advokasi dan Sosialisasi Narkoba dan HIV/AIDS	Kelembagaan aktif dan dapat menanggulangi kasus narkoba dan HIV/AIDS	Enrekang	12 Kec.	38,317	APBD		60%	42.148.

3	Koordinasi dan fasilitasi Komosi pengendalian zoonosi	Menurunnya Penyakit hewan yang menular ke manusia	Enrekang	70 %	90.000	APBD		60	99.000.
	<b>Urusan Perencanaan</b>								
<b>II</b>	<b>Program Pengembangan Data &amp; Informasi</b>	<b>Tersedianya data dan informasi Investasi</b>		<b>83%</b>	<b>41,210</b>	<b>APBD</b>		<b>83%</b>	<b>66,210</b>
4	Penyiaran dan pelaporan harga kebutuhan pokok dan barang strategis lainnya	Tersebaranya Informasi harga Kebutuhan pokok melalui Media Radio	Kabupaten	83 % ( 53 X Penyiaran	41.210.	APBD		100 %	45.331
5	Pembuatan film dokumenter tentang profil, potensi, dan investasi daerah	Jumlah film dokumenter yang dihasilkan	Kabupaten			APBD		1 film	10.000
6	Pembuatan baliho/ billboard potensi dan promosi daerah	Jumlah baliho/billboard yang dihasilkan	Kabupaten			APBD		4 Unit	15.000
7	Penyiaran dan pelaporan harga kebutuhan pokok dan barang strategis lainnya	Tersebaranya Informasi harga Kebutuhan pokok melalui Media Radio	Alla dan Enrekang						
<b>III</b>	<b>Program perencanaan pembangunan daerah</b>	<b>Adanya dokumen penetapan kinerja Pemda</b>		1 Kali	24,204	APBD		1 Kali	24,204
8	Koordinasi Penyusunan Kinerja Pemerintah Daerah	Tersedianya dokumen penetapan kinerja pemerintah kab. Enrekang setiap tahun	Kabupaten	1 Kali	30.000	APBD		1 Kali	33.000
<b>IV</b>	<b>Program pengembangan sistim pelaporan,</b>	<b>1 . Persentase pemenuhan pelaporan</b>		<b>100%</b>	<b>130,338</b>	APBD		<b>100%</b>	<b>130,338</b>

	<b>Monitoring/Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah</b>	<b>pemda yang dipersyaratkan (LKPJ, LPPD, ILPPD dan LAKIP) 2. Cakupan pengendalian administrasi atas program pembangunan</b>							
<b>9</b>	Koordinasi Penyusunan LKPJ, LPPD, dan ILPPD	Terwujudnya peningkatan pembangunan daerah di Kabupaten Enrekang	Kabupaten	100%	50,000	APBD		100%	55,000
<b>10</b>	Penyusunan LAKIP Daerah	Tersedianya laporan capaian kinerja pemerintah kabupaten Enrekang	Kabupaten	1 Kali	45.000	APBD		1 Kali	49,500
<b>11</b>	Peningkatan pengendalian administrasi perencanaan pembangunan	Meningkatnya pengendalian administrasi pembangunan	Kabupaten	85%	12,000	APBD		85%	13,200
<b>12</b>	Peningkatan sistem informasi pengendalian operasional kegiatan (Teppa)	Tersedianya dokumen pelaporan belanja APBD	Kabupaten	12 Bulan	13,000	APBD		12 Bulan	14,300
<b>13</b>	Pemantauan Monitoring terpadu kegiatan fisik APBD	Tersedianya laporan kegiatan fisik APBD	Kabupaten	12 Kec	15,000	APBD		12 Kec	16,500
	<b>Urusan Lingkungan Hidup</b>								
<b>V</b>	<b>Pengendalian pencemaran dan pengrusakan lingkungan hidup</b>	<b>Terwujudnya pengendalian pengrusakan ling. hidup</b>		70%	<b>37,500</b>	APBD		70%	<b>37,500</b>

14	Koordinasi penyusunan AMDAL	Terciptanya koordinasi penyusunan AMDAL	5 Kec. Se Kab. Enrekang	5 kali	7,000	APBD		5 kali	7,700
15	Pengawasan kegiatan penambangan bahan galian C	Meningkatnya pengawasan pelaksanaan kegiatan penambangan bahan galian C	12 Kec. Se Kab.Ekg	12 kec.	5,000	APBD		12 kec.	5,500
16	Koordinasi peran serta masyarakat terhadap pengendalian dan konservasi SDA	Terwujudnya koordinasi peningkatan peran serta masyarakat terhadap pengendalian dan konservasi SDA	10 Kec. Se Kab. Enrekang	10 kali	6,500	APBD		10 kali	71.500
17	Penertiban kegiatan penambangan rakyat	Meningkatnya pengawasan penertiban kegiatan penambangan rakyat	12 Kec. Se Kab. Enrekang	12 kec.	15,000	APBD		12 kec.	16,500
18	Monitoring, evaluasi dan pelaporan dampak kerusakan lingkungan	Terlaksananya monitoring, evaluasi dan pelaporan dampak kerusakan lingkungan akibat kegiatan pengolahan sumber daya alam.	12 Kec. Se Kab. Enrekang	12 kec.	4,000	APBD		12 kec.	4,400
VI	<b>Program perlindungan dan konservasi sumber daya alam</b>	<b>1. Adanya regulasi dan pemahaman regulasi tentang pengelolaan sumber daya alam 2. prekuensi koordinasi pengendalian SDA dan</b>		<b>12 Kec</b>	<b>111,500</b>	APBD		<b>12 Kec</b>	<b>108.500</b>

		<b>LH</b>							
<b>19</b>	Penyusunan regulasi tentang sumber daya alam	Terwujudnya regulasi mengenai kegiatan sumber daya alam bidang pertambangan, pertanian, kehutanan, peternakan dan perikanan serta lingkungan hidup	Kabupaten	1 Perda/ Perbup	6,000	APBD		100 %	6.600
<b>20</b>	Sosialisasi regulasi mengenai kegiatan sumber daya alam	Sosialisasi regulasi mengenai kegiatan sumber daya alam	Kabupaten	150 Org	5,000	APBD		100 %	5.500
<b>21</b>	Koordinasi tentang hasil produksi di bidang pertambangan	Terciptanya koordinasi tentang hasil produksi di bidang pertambangan	12 Kec. Se Kab. Enrekang	21 kali	7,500	APBD		21 kali	8,250
<b>22</b>	Penyusunan perencanaan program pengendalian SDA dan lingkungan hidup	Terkoordinasinya perencanaan dan penyusunan program pembangunan pengendalian SDA dan lingkungan hidup	10 Kec. Se Kab. Enrekang	15 kali	6,500	APBD		15 kali	7,150
<b>23</b>	Koordinasi tata kelola pemanfaatan SDA	Meningkatnya efektifitas dan efisiensi tata kelola pemanfaatan SDA bagi masyarakat	12 Kec. Se Kab. Enrekang	12 kec.	95,000	APBD		12 kec.	99,000
<b>24</b>	Identifikasi dan inventarisasi obyek wisata alam	Terlaksananya identifikasi dan inventarisasi obyek dan daya tarik wisata alam	12 Kec. Se Kab.	12 kec.	4,500	APBD		12 kec.	4,950

		khusus trekking, mendaki gunung, rekreasi air, dan wisata religius	Enrekang						
<b>VII</b>	<b>Program Peningkatan kualitas dan akses informasi sumber daya alam</b>	<b>Terwujudnya akses informasi SDA</b>		<b>60%</b>	<b>42,504</b>	APBD		<b>70%</b>	<b>43,504</b>
<b>25</b>	Pengadaan bahan informasi/ data sumber daya alam	Tersedianya pengadaan bahan informasi berupa data sumber daya alam dalam bentuk : buku, brosur, leaflet, poster, dll	Kabupaten	100 buah	16,000	APBD		100 buah	17,600
<b>26</b>	Penyebarluasan informasi sumber daya alam melalui jaringan internet	Tersedianya pembuatan bahan informasi sumber daya alam melalui jaringan internet	Kabupaten	1 kali	4,500	APBD		1 kali	4,950
27	Pembuatan Peta Potensi SDA	Tersedianya peta potensi sumber daya alam di bidang pertambangan, pertanian, peternakan, perikanan dan kehutanan,	Kabupaten	4 buah	23,000	APBD		4 buah	25,300
28	Inventarisasi dan verifikasi unsure unsure Rupabumi	Terwujudnya data dan informasi yang akurat tentang unsure unsure Ripabumi	Kabupaten	2 Unsur (alami dan buatan)	70.000	APBD		2 Unsur (alami dan buatan)	77.000
	<b>Urusan KB, Pengarusutamaan Gender dan Anak</b>								

<b>VIII</b>	<b>Program Penguatan Kelembagaan dan Pengarusutamaan Gender dan Anak</b>	<b>Terwujudnya kelembagaan dan penagrutamaan gender dan anak</b>		<b>20%</b>	<b>25,000</b>	APBD		<b>20%</b>	<b>25,000</b>
<b>29</b>	Pembinaan Potensi Organisasi dan Lembaga Masyarakat yang berperan dalam pemberdayaan perempuan dan anak	Menurunnya angka tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak	Kabupaten	20%	25,000	APBD		20%	27,500
	<b>Bidang Sosial</b>								
<b>IX</b>	<b>Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial.</b>	<b>Terwujudnya kelembagaan dan pemberdayaan kesejahteraan sosial</b>		<b>100%</b>	<b>1,300,000</b>	APBD		<b>100%</b>	<b>1,300,000</b>
<b>30</b>	Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial Lainnya.	Terwujudnya bantuan sosial kepada pengurus mesjid (Imam, Pembina TPA, Penyuluh Non PNS, dan Pencatat Nikah dan pelaksanaan open house idul fitri )	Kabupaten	100%	1,500,000	APBD		100%	1,650,000
<b>X</b>	<b>Program Pembinaan Kesejahteraan Sosial Masyarakat</b>	<b>Prekuensi kegiatan pabilitasi dan pembinaan keagamaan</b>		<b>90%</b>	<b>942,464</b>	APBD		<b>90%</b>	<b>942,464</b>
<b>31</b>	Pendidikan dan pelatihan Pembina TPA/Guru Mengaji	Terlaksananya Kualifikasi Kompetensi Pembina TPA	Kabupaten	50 Pembina TPA/Guru Mengaji	20,175	APBD		50 Pembina TPA/Guru Mengaji	22,195.
<b>32</b>	Pembinaan kerohanian lingkup Pemerintah	Meningkatnya Pemahaman Nilai-nilai	Kabupaten	22 Kali	208,624	APBD		22 Kali	229,486



	Kabupaten Enrekang	Al-Quran sehingga tercapai PNS yang berkualitas IMTAG dan IPTEK							
<b>33</b>	Penyelenggaraan Pemberangkatan dan Pemulangan Jamaah Haji Asal Kab. Enrekang.	Terwujudnya Kelancaran Penyelenggaraan Pemberangkatan dan Pemulangan Jamaah Haji Asal Kab. Enrekang.	Kabupaten Dan Provinsi	2 Kali	143,665	APBD		2 Kali	158,665
<b>34</b>	Pembinaan Kegiatan Keagamaan Islam Lainnya.	Terwujudnya pelaksanaan kegiatan keagamaan	Kabupaten	10 Kali	70,000	APBD		10 Kali	77,000
<b>35</b>	Penyelenggaraan MTQ Tingkat Kabupaten Enrekang	Terpilihnya Qari' dan Qariah Terbaik di Kabupaten Enrekang	Kabupaten	23 Cabang Lomba	419,500	APBD		100 %	461.450
<b>36</b>	Pelaksanaan MTQ Tingkat Provinsi	Terpilihnya Qari', Qariah, Mufassil dan hafiz yang mewakili Kab. Enrekang	Provinsi	23 Cabang Lomba	264,500	APBD		100 %	290.400
<b>37</b>	Pelaksanaan STQ Tingkat Provinsi	Terpilihnya Qari', Qariah, Mufassil dan hafiz yang mewakili Kab. Enrekang	Provinsi			APBD		3 Cabang Lomba	20.000
<b>38</b>	Penyelenggaraan Festival Anak Saleh Tingkat Kabupaten	Terpilihnya Hafidz-Hafidzah dan Mufasir-Mufasirah yang mewakili Kabupaten Enrekang di Arena FASi Tingkat Provinsi	Kabupaten			APBD		23 Cabang Lomba	12.000
<b>39</b>	Pelaksanaan Safari Ramadhan	Terwujudnya safari ramadan dengan Masyarak	12 Kec. Se Kab.	12 Kec	128.000	APBD		12 Kec.	140.800

		Enrekang	Enrekang						
40	Koordinasi dan fasilitasi Bagian Kesejahteraan Rakyat	Terlaksananya bagian kesejahteraan rakyat	Provinsi	12 Kali	25.000	APBD		12 Kali	27.500
	<b>Urusan Penanaman Modal</b>								
XI	<b>Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi</b>	<b>Terwujudnya promosi dan kerjasama investasi</b>		6 X Pameran	160,000	APBD		7 X Pameran	180,000
41	Penyelenggaraan pameran investasi	Terlaksananya Pameran Investasi dan Pameran Produk Unggulan UMKM	Kabupaten, Provinsi dan Pusat	9 X Pameran	115,000	APBD		9 X Pameran	126,500
42	Pelaksanaan koordinasi antar kabupaten/kota, propinsi terkait kebijakan koperasi	Terwujudnya Koordinasi Antar Kabupaten/Kota, Propinsi terkait kebijakan koperasi	Kabupaten, Provinsi dan Pusat	30 KUKM	45,000	APBD		30 KUKM	49,500
	<b>Urusan Pemuda dan Olah Raga</b>								
XII	<b>Program Peningkatan Peran serta Kepemudaan</b>	<b>Jumlah generasi muda/pemuda berprestasi yang dibina</b>		25 x Koordinasi	14,000	APBD		25 x Koordinasi	14,000
43	Koordinasi Pembinaan Generasi Muda/Pemuda Berprestasi	Terlaksananya koordinasi Pembinaan Terhadap Generasi Muda/Pemuda Berprestasi	Kabupaten	25 x Koordinasi	14,000	APBD		25 x Koordinasi	15,400

<b>XIII</b>	<b>Program peningkatan sarana dan prasarana olah raga</b>	<b>Jumlah fasilitas olah raga yang dikelola dan ditangani secara operasional dan pemeliharaan</b>		<b>85%</b>	<b>65,000</b>	APBD		<b>85%</b>	<b>65,000</b>
<b>44</b>	Pemeliharaan rutin/berkala Sarana Prasarana Olahraga	Terlaksananya Pemeliharaan Sarana Prasarana Olahraga	Kabupaten	3 Unit	65,000	APBD		3 Unit	71.500
	<b>Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri</b>								
<b>XIV</b>	<b>Program pengembangan wawasan kebangsaan</b>	<b>Terwujudnya pemberdayaan kelompok masyarakat dalam menjaga keamanan lingkungan</b>		<b>12 Klp</b>	<b>113,352</b>	APBD		<b>12 Klp</b>	<b>113,352</b>
<b>45</b>	Koordinasi Pembinaan Masyarakat Tentang Wawasan Kebangsaan	Terlaksananya Pembinaan tentang Peningkatan Wawasan Lingkungan/ Kebangsaan	Kabupaten dan 12 Kecamatan	20 X Koordinasi	23,352	APBD		20 X Koordinasi	25,687
<b>46</b>	Koordinasi Pembinaan Keamanan & Ketertiban serta Perlindungan Masyarakat	Terlaksananya Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	Kabupaten dan 12 Kecamatan	30 X Koordinasi	90,000	APBD		30 X Koordinasi	99,000
<b>47</b>	Koordinasi dan pemantauan pelaksanaan Pemilihan Umum	Terwujudnya pelaksanaan Pemilihan Umum yang LUBER	Kabupaten	1 Pemilu	50.000	APBD		0	0
<b>XV</b>	<b>Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan</b>	<b>Terwujudnya pemberdayaan kelompok masyarakat dalam menjaga</b>		30 X Koordinasi	125,000	APBD		30 X Koordinasi	125,000

	<b>keamanan</b>	<b>keamanan lingkungan</b>							
<b>48</b>	Koordinasi pelaksanaan pemantauan kegiatan politik	Terlaksananya Koordinasi pelaksanaan pemantauan kegiatan politik	Kabupaten dan 12 Kecamatan	30 X Koordinasi	105,000	APBD		30 X Koordinasi	115,500
<b>49</b>	Koordinasi pengutanan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pedesaan	Terlaksananya Koordinasi Kelembagaan dan Organisasi Masyarakat Pedesaan	Kabupaten dan 12 Kecamatan	30 X Koordinasi	20,000	APBD		30 X Koordinasi	22,000
	<b>Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah Kepegawaian dan Persandian</b>								
<b>XVI</b>	<b>program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah / wakil kepala daerah</b>	<b>Tingkat realisasi rencana aktifitas kegiatan Bupati/Wakil Bupati</b>		100%	<b>2,789,118</b>	APBD		100%	<b>2,941,118</b>
<b>50</b>	Dialog/Audensi KDH/WKDH dengan Tokoh Masyarakat dan pimpinan /anggota Organisasi Masyarakat	Terjalannya komunikasi antara BKDH/WKDH dengan Tokoh Masyarakat	Kabupaten	100%	342.442	APBD		100%	375,590
<b>51</b>	Rapat koordinasi pejabat pemerintah daerah	Terwujudnya koordinasi antar pejabat pemerintah daerah	Kabupaten	100%	143,197	APBD		100%	157,516
<b>52</b>	Kunjungan kerja / inspeksi kepala daerah / wakil kepala daerah	Terwujudnya pengawasan KDH/WKDH	Kabupaten	100%	102,327	APBD		100%	134.600
<b>53</b>	Koordinasi dengan pemerintah pusat dan	Meningkatnya dengan pemerintah pusat dan	Pemerintah Pusat,	100%	620,000	APBD		100%	682,000

	pemerintah daerah lainnya	pemda lainnya	Provinsi dan kab. lainnya.						
<b>54</b>	Rapat Kerja Daerah	Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang lebih efektif dan efisien	Kabupaten	100%	35,000	APBD		100%	38,500
<b>55</b>	Peningkatan operasional rumah tangga kepala daerah / wakil kepala daerah	terpenuhinya operasional rumah tangga Bupati dan Wakil Bupati	Kabupaten	100%	800,000	APBD		100%	880,000
<b>56</b>	Penerimaan tamu-tamu pemda	Meningkatnya pelayanan tamu-tamu pemda	Kabupaten	100%	943,873	APBD		100%	1.038,260
<b>XVII</b>	<b>Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah</b>	<b>Tingkat kesesuaian paket regulasi pengelolaan keuangan daerah dengan regulasi pemerintah pusat</b>		<b>100%</b>	<b>159,121</b>	APBD		<b>100%</b>	<b>159,121</b>
<b>57</b>	Penyusunan standar harga satuan barang dan jasa	Terlaksananya Penyusunan Standarisasi Harga Barang dan Jasa	Kabupaten	100 Buku	64,121	APBD		100 Buku	70,533
<b>58</b>	Unit Layanan Pengadaan Barang dan Jasa	Terlaksananya system pelelangan barang dan jasa	Kabupaten	100 %	293.816	APBD		100 %	323.197
<b>59</b>	Peningkatan Manejemen dan Pelayanan Pengelolaan administrasi asset/Barang Daerah	Tersedianya laporan Administrasi Asset/Barang secara terkendali	Kabupaten	1 Paket	180.000	APBD		1 Paket	198.000
<b>60</b>	Pengendalian Pengawasan, Pengawasan, Pemantauan dan	Tersedianya laporan Adm penggunaan asset/barang daerah	Kabupaten	1 Paket	90.000	APBD		1 Paket	99.000

	monitoring asset/barang daerah	secara terkendali							
<b>61</b>	Rekonsiliasi laporan realisasi asset/barang daerah per SKPDTA2018	Tersedianya data realisasi asset/barang daerah per SKPD	Kabupaten	1 Paket	85.000	APBD		1 Paket	93.500
<b>62</b>	Inventarisasi dan Penertiban Masalah Pertanahan dalam wilayah Kabupaten Enrekang	Terlaksananya Inventarisasi dan Penertiban Masalah Pertanahan dalam wilayah Kabupaten Enrekang	Kabupaten	1 Paket	51.881	APBD		1 Paket	57.070
<b>63</b>	Rekonsiliasi dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan	Terwujudnya rekonsiliasi kegiatan pemda	Kabupaten Dan Provinsi	16 Keg	25,000	APBD		16 Keg	27,500
<b>64</b>	Koordinasi Pengelolaan Adm. Keuangan	Terlaksananya Koordinasi Pengelolaan Adm. Keuangan Daerah	Kabupaten	12 Bulan	70,000	APBD		12 Bulan	77,000
<b>65</b>	Pengelolaan pelaporan inventarisasi asset/barang daerah	Tersedianya laporan inventarisasi Asset/Barang Daerah	Kabupaten	1 Paket	498.110	APBD		1 Paket	547.900
<b>66</b>	Penghapusan asset/barang milik daerah	Tersedianya barang/Asset Daerah yang akan dihapus	Kabupaten	1 Paket	150.000	APBD		1 Paket	165.000
<b>67</b>	Penyusunan Neraca Asset	Tersedianya data penyusunan neraca	Kabupaten	1 Paket	40.000	APBD		1 Paket	44.000
<b>68</b>	Pengsertifikatan Tanah Milik Pemda	Terwujudnya Pengsertifikatan Tanah Milik Pemda	Kabupaten	1 Paket	200.000	APBD		1 Paket	220.000
<b>69</b>	Penyusunan RKBMD pengadaan dan RKBMD Penyusunan RKBD Pemeliharaan	RKBMD Pengadaan dan RKBMD pemeliharaan	Kabupaten	1 Paket	50.000	APBD		1 Paket	55.000

<b>70</b>	Penelaian dan penafsiran asset	Terlaksananya penilaian barang milik daerah	Kabupaten	1 Paket	60.000	APBD		1 Paket	66.000
<b>XVIII</b>	<b>Program Peningkatan Sistim pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH</b>	<b>Tingkat Penyelesaian /tindak lanjut hasil temuan pemeriksaan</b>		<b>95%</b>	<b>595,518</b>	APBD		<b>90%</b>	<b>625,518</b>
<b>71</b>	Tindak lanjut hasil temuan pengawasan	Jumlah Rekomendasi Inspektorat Kabupaten, Inspektorat Provinsi, BPKP, dan BPK ditindaklanjuti	Pemerintah Pusat, dan Provnsi	70%	90,518	APBD		70%	99,560
<b>72</b>	Koordinasi Penyampaian Laporan Hasil kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN)	Koordinasi Penyampaian Laporan Hasil kekeniyaan Penyelenggara Negara (LHKPN)	Pemerintah Pusat	27%	35,000	APBD		30%	60.500
<b>73</b>	Pengembangan analisis dan penelahan kebijakan daerah	Terwujudnya Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan KDH	Pemerintah Pusat, dan Provnsi	80%	300,000	APBD		80%	330,000
<b>XIX</b>	<b>Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistim dan Prosedur Pengawasan</b>	<b>Jumlah SKPD yang ditetapkan sebagai zona integritas</b>		<b>5 SKPD</b>	<b>73,700</b>	APBD		<b>5 SKPD</b>	<b>81,070</b>
<b>74</b>	Penetapan zona integritas Pemda	Tersedianya zona integritas	Kabupaten	2 SKPD	29,500	APBD		2 SKPD	32,450
<b>75</b>	Monitoring dan pelaporan pelaksanaan percepatan pemberantasan korupsi	Tersedianyan laporan percepatan pemberantasan korupsi	Kabupaten	1 Kali	32,250	APBD		1 Kali	35.475

<b>76</b>	Monitoring dan evaluasi pelaksanaan pakta integritas pemda	Tersedianya dokumen pakta integritas pemda	Kabupaten	1 Kali	24,200	APBD		1 Kali	26,620
<b>XX</b>	<b>Program Peningkatan kerjasama antar pemerintah Daerah</b>	<b>Jumlah dokumen perjanjian kerjasama pemda dengan daerah (lembaga lainnya)</b>		<b>10 MOU</b>	<b>127,110</b>	APBD		<b>10 MOU</b>	<b>127,110</b>
<b>77</b>	Pelaksanaan Koordinasi antar kabupaten	Terlaksananya Koordinasi Antar Kabupaten/Kota, Propinsi & Luar Propinsi	Provinsi dan Antar Kabupaten	35 Kali	<b>40,000</b>	APBD		35 Kali	<b>44,000</b>
<b>78</b>	Koordinasi antara pemda dengan APKASI	Terwujudnya Koordinasi antara Pemda dengan Asosiasi Pemkab Seluruh Indonesia (APKASI)	Provinsi dan Pusat	80%	87,110	APBD		80%	95,820
<b>XXI</b>	<b>Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan</b>	<b>% realisasi prolegda yang ditetapkan menjadi perda</b>		<b>8 Perda</b>	<b>150,000</b>	APBD		<b>8 Perda</b>	<b>155,000</b>
<b>79</b>	Legislasi rancangan peraturan perundang-undangan	Perda ditetapkan berdasarkan Program Legislasi Daerah	Kabupaten	80%	20,000	APBD		85%	22,000
<b>80</b>	Pelembaran daerah dan dokumentasi produk hukum daerah	Jumlah Perda, Perbub dan Keppub Diundangkannya/ ditetapkan	Kabupaten	10 perda, 30 Perbub, 700 Keppub	40,000	APBD		10 perda, 30 Perbub, 700 Keppub	44,000
<b>81</b>	Evaluasi dan Perumusan Kebijakan Daerah	Jumlah Peraturan Daerah, Peraturan Bupati, dan Keputusan Bupati yang telah diundangkan/	Kabupaten	10 perda, 30 Perbub, 700 Keppub	100,000	APBD		10 perda, 30 Perbub, 700 Keppub	110,000



		ditetapkan didokumentasikan							
<b>XXII</b>	<b>Program Penataan Daerah Otonomi Baru</b>	<b>Jumlah kecamatan dan desa yang dimekarkan</b>		1 Kec. 5 Desa/ Kel	<b>135,211</b>	APBD		1 Kec. 5 Desa/ Kel	<b>135,211</b>
<b>82</b>	Pasilitasi percepatan penyelesaian tapal batas wilayah administrasi antar daerah	Terselesaikannya batas wilayah kabupaten dan Kecamatan	1 Kecamatan	10 Patok Batas	60,211	APBD		10 Patok Batas	66,232
<b>83</b>	Pemekaran wilayah kecamatan dan Desa/Kelurahan	Meningkatnya pelayanan kepada masyarakat	5 Kecamatan	1 Kec. 5 Desa/Kel	75,000	APBD		1 Kec. 5 Desa/Kel	82,500
<b>84</b>	Penyusunan laporan evaluasi kemampuan penyelenggaraan Otonomi Daerah	Terwujudnya laporan kesejahteraan dan pemerataan ekonomi	Kabupaten	1 Laporan	40.000	APBD		1 Laporan	44.000
<b>85</b>	Sosialisasi dan publikasi Peta Batas Daerah Antar Kabupaten dan Batas wilayah dalam Kabupaten	Terlaksananya sosialisasi dan publikasi peta batas daerah antar Kabupaten dan batas wilayah dalam kabupaten Enrkang	Kabupaten	12 Kec.	50.000	APBD		12 Kec.	55.000
<b>XXIII</b>	<b>Program Peningkatan Pengelolaan Administrasi dan Kelembagaan Pemerintah Daerah</b>	<b>Tingkat pelaksanaan sistim pengendalian administrasi pemerintahan, kepegawaian, pembangunan dan administrasi umum</b>		<b>80%</b>	<b>880,218</b>	APBD		<b>85%</b>	<b>1.007,218</b>

		<b>pemda</b>							
<b>86</b>	Pembinaan Administrasi dan Kepegawaian dan Pemerintahan	Terlaksananya Pembinaan dan Koordinasi Kepegawaian dan Pemerintahan	Kabupaten	90%	290,500	APBD		90%	319,550
<b>87</b>	Pembinaan dan Koordinasi Administrasi Pemerintahan	Terlaksananya Pembinaan dan Koordinasi Adm. Pemerintahan	Kabupaten	90%	251,000	APBD		90%	276,100
<b>88</b>	Pembinaan dan Koordinasi Administrasi Pembangunan	Terlaksananya Pembinaan dan Koordinasi Adm. Pembangunan	Kabupaten	90%	251.000	APBD		90%	276.100
<b>89</b>	Pembinaan dan Koordinasi Administrasi umum dan Kepegawaian	Terlaksananya Pembinaan dan Koordinasi Adm. Umum dan Kepegawaian	Kabupaten	90%	251.000	APBD		90%	276.100
<b>90</b>	Sosialisasi Standar Pelayanan Minimum	Meningkatnya pelaksanaan SPM	Kabupaten	1 Kali	28,600	APBD		1 Kali	31.460
<b>91</b>	Pembinaan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)	Proses pelayanan yang cepat, tepat dan akuntabel di tingkat kecamatan	12 Kecamatan dalam kab. Enrekang	100 %	60,000	APBD		100 %	66,000

92	Pembinaan dan Penataan Administrasi Kecamatan dan Kelurahan	Tingkat kemampuan aparatur kecamatan dalam penataan adm. Kecamatan	12 Kecamatan dalam kab. Enrekang	100 %	12,500	APBD		100%	13,750
93	Koordinasi, konsultasi dan Pembinaan Adm Pemerintahan	Terwujudnya pengelolaan dm Pemerintahan yang baik	Kabupaten	90 %	100.000	APBD		90%	110.000
<b>XXIV</b>	<b>Program Peningkatatan pelayanan pengadaan dan pembinaan penyedia barang dan jasa</b>	<b>Cakupan inplementasi sistim pengadaan barang dan jasa secara elektronik</b>		<b>80%</b>	<b>561,650</b>	APBD		<b>80%</b>	<b>606,821</b>
94	Unit layanan pengadaan barang dan jasa	Terimplementasinya sistem pelelangan barang dan jasa	Kabupaten	43 SKPD	252,146	APBD		43 SKPD	277,360
95	Penunjang pelaksanaan ULP	Tersedianya sarana penunjang ULP	Kabupaten	1 Paket	15,000	APBD		1 Paket	16,500
96	Pelaksanaan Layanan Pengadaan secara elektronik ( LPSE)	Terwujudnya pelelangan barang dan jasa yang efisien, efektif, transparan dan terbuka	Kabupaten	43 SKPD	213,947	APBD		41 SKPD	235,541
97	Pemeliharaan website LPSE	Terpeliharanya sarana dan prasarana LPSE	Kabupaten	1 Set	30,000	APBD		1 Set	33,000
98	Pelaksanaan pelelangan /pengadaan barang dan jasa	Terlaksananya pelelangan dan pengadaan barang dan jasa	Kabupaten	1 Kali	10,524	APBD		1 Kali	11.576
99	Pembinaan Penyedia Jasa Kontruksi	Tersedianya penyedia jasa kontruksi yang berdaya saing tinggi	Kabupaten	146 Prsh	20,000	APBD		146 Prsh	22,000
100	Penyusunan propil perusahaan penyedia	Tersedianya buku data perusahaan penyedia	Kabupaten	146 Prsh	12,278	APBD		146 Prsh	13,500

	barang dan jasa	barang dan jasa							
<b>101</b>	Pelaksanaan penerbitan surat izin usaha jasa kontruksi	Menigkatnya jumlah penyedia barang dan jasa yang memiliki SIUJK	Kabupaten	146 Prsh	52,926	APBD		1146 Prsh	58,200
<b>XXV</b>	<b>Program Pengelolaan dan Pengembangan Asset Pemerintah Daerah</b>	<b>% Asset pemda yang terinventarisir dan memenuhi standar administrasi</b>		<b>90%</b>	<b>290,252</b>	APBD		<b>90%</b>	<b>290,252</b>
<b>102</b>	Penataan dan Pembebasan Tanah Perkotaan/Perdesaan	Tersedianya Lahan untuk Kepentingan Umum	3 Kecamatan	100 %	250,000	APBD		100%	275,000
<b>103</b>	Inventarisasi dan Penertiban Masalah Pertanahan dalam wilayah Kabupaten Enrekang	Tertibnya Asset Pemda	12 Kecamatan dalam Kab. Enrekang	90%	40,252	APBD		100%	44,277
<b>104</b>	Pemetaan dan penetapan Tanah Objek Reforma Agraria di Kab. Enrekang	Tersedianya data area tanah di luar kawasan yang dapat dimanfaatkan masyarakat	Kabupaten	50 %	50.000	APBD		50 %	55.000
<b>XXVI</b>	<b>Program Pengembangan Ketatalaksanaan Pemerintah Daerah</b>	<b>Tingkat penerapan regulasi dan pedoman tatalaksana penyelenggaraan pemerintahan daerah</b>		<b>85%</b>	<b>450,560</b>	APBD		<b>85%</b>	<b>495,616</b>
<b>105</b>	Penataan kelembagaan Pemda	Meningkatnya penataan Kelembagaan Pemda	Kabupaten	85%	87,846	APBD		80 %	96,630
<b>106</b>	Penyusunan Tatanaskah Dinas	Tersedianya pedoman tata naskah dinas daerah	Kabupaten	43 Exp	48,000	APBD		43 Exp	52,800

<b>107</b>	Penataan Administrasi Kepagawiaian Setda	Meningkatnya penataan adm. Kepegawiaian di Setda	Kabupaten	12 Bulan	35,000	APBD		12 Bulan	38,500
<b>108</b>	Penyusunan Buku Kerja Pemerintah Daerah	Tersedianya buku kerja pemerintah daerah	Kabupaten	100 %	53,000	APBD		100 %	58,300
<b>109</b>	Koordinasi, Konsultasi ketatalaksanaan, kelembagaan dan kepegawiaian	Meningkatnya koordinasi bidang kelembagaan dengan Pemprop dan Pempus	Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten lainnya.	1 Paket	140,500	APBD		1 Paket	154,500
<b>110</b>	Penataan data Struktur Organisasi Pemda	Tersedianya informasi struktur Pemda	Kabupaten	2 Unit	43.900	APBD		2 Unit	48.200
<b>111</b>	Penyusunan Peraturan-peraturan yang terkait ketatalaksanaan	Meningkatnya produk ketatalaksanaan	Kabupaten	15 PerbupSK, SE dll	40,000	APBD		15 PerbupSK, SE dll	44,000
<b>112</b>	Penyusunan TUPOKSI	Tersedianya Perbup tentang Tupoksi Jabatan Pemda	Kabupaten	13 SKPD	90,000	APBD		13 SKPD	99,000
<b>113</b>	Lomba Unit Pelayanan Publik	Terpilihnya SKPD yang mewakili Kab. Dalam lomba UPB di tingkat Prop/Pusat	Kabupaten dan Provinsi	1 Kali	30,000	APBD		1 Kali	33,000
<b>114</b>	Penyusunan Laporan Pencapaian SPM	Tersedianya laporan pencapaian SPM di daerah	Kabupaten	2 Kali	33,000	APBD		2 Kali	36,300
<b>115</b>	Penyusunan SOP SKPD	Jumlah SKPD yang memiliki SOP/revisi	Kabupaten dan Provinsi	43	175.000	APBD		43	192.500

116	Penyusunan IKM	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Kabupaten dan Provinsi	50 %	185.000	APBD		50 %	203.500
<b>XXVII</b>	<b>Program Penanganan/perlindungan hukum dan pembinaan kesadaran hukum/HAM</b>	<b>1. % Penyelesaian permasalahan Hukum Pemda 2. Jumlah kelompok masyarakat sadar hukum</b>		<b>100%</b>	<b>318,482</b>	APBD		<b>100%</b>	<b>318,482</b>
117	Pemberian Bantuan Hukum	Tingkat Penyelesaian Permasalahan Perdata dan TUN	Kabupaten	100%	187,818	APBD		100%	206.600
118	Penyuluhan Hukum dan Sosialisasi Perda	Jumlah pelaksanaan Penyuluhan Hukum dan Sosialisasi Produk Hukum Daerah	Kabupaten dan 12 Kecamatan	12 kali	85,664	APBD		12 kali	94.230
119	Pembinaan Desa Sadar Hukum/Kelompok Sadar Hukum	Jumlah Kelompok Sadar Hukum /Desa Sadar Hukum	3 Kecamatan	5 KLP	20,000	APBD		5 KLP	22,000
120	Pelaksanaan RANHAM	SKPD memiliki program Pro HAM	Kabupaten	100%	25,000	APBD		100%	27,500
	<b>Urusan Informasi dan Teknologi</b>								
<b>XXVII I</b>	<b>Program pengembangan komunikasi, informasi, dan media massa</b>	<b>% data dan informasi kegiatan pemda yang dipublikasikan kepada masyarakat</b>		<b>80%</b>	<b>606,910</b>	APBD		<b>80%</b>	<b>654,165</b>
121	Peningkatan pelayanan sandi	Meningkatnya pelayanan adm. persandi dan persuratan lainnya	Kabupaten	100%	27,500	APBD		100%	30,250
122	Pelaksanaan publikasi dan	Masyarakat dapat	Kabupaten	100%	275,000	APBD		100%	302.500

	dokumentasi pemda	mengetahui informasi tentang pembangunan daerah melalui media cetak dan elektronik dan tersedianya dokumentasi daerah							
<b>123</b>	Pelaksanaan jumpa pers Pemda	Meningkatnya pemahaman masyarakat tentang pelaksanaan pembangunan dan pengembangan potensi daerah	Kabupaten	100%	225,000	APBD		100%	247,500
<b>124</b>	Pelayanan pengaduan SMS Center	Terpenuhinya kebutuhan operasionalisasi SMS dari masyarakat	Kabupaten	100%	104,360	APBD		100%	114,700
<b>125</b>	Pengadaan sarana telekomunikasi Setda	Jumlah bagian yang terkoneksi jaringan internet	Kabupaten	3 Bagian	25,000	APBD		3 Bagian	27,500
	<b>Urusan Pilihan</b>								
	<b>Urusan Pertanian/perkebunan</b>								
<b>XXIX</b>	<b>Program Peningkatan Produksi Pertanian / Perkebunan</b>	<b>Meningkatnya produksi pertanian/perkebunan</b>		<b>80%</b>	<b>115,000</b>	APBD		<b>80%</b>	<b>120,000</b>
<b>126</b>	Peningkatan kualitas produksi tembakau	Meningkat Produksi dan Kualitas Tembakau	Kecamatan Curio	90 Orang Petani	115,000	APBD		100 Orang Petani	120,000
	<b>Belanja Administrasi Umum</b>								

<b>XXX</b>	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>Terwujudnya pelayanan Administrasi Kantor</b>		<b>90%</b>	<b>2,486,814</b>	APBD		<b>90%</b>	<b>2,739,259</b>
<b>127</b>	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air, dan listrik	Tersedianya jasa pelayanan komunikasi, sumber daya air dan listrik	Kabupaten	12 Bulan	400,700	APBD		12 Bulan	440,700
<b>128</b>	penyediaan jasa jaminan pemeliharaan kesehatan Bupati dan Wakil Bupati	Terjaminnya tingkat kesehatan Bupati dan Wakil Bupati (Cek up)	Kabupaten	2 Kali	40,000	APBD		2 Kali	44,000
<b>129</b>	penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	tersedianya komponen alat listrik/penerangan bangunan kantor	Kabupaten	12 bulan	29,600	APBD		12 bulan	32.560
<b>130</b>	rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Terwujudnya koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat	12 Bulan	600,000	APBD		12 Bulan	660,000
<b>131</b>	koordinasi, konsultasi dalam daerah dan peninjauan lapangan	terlaksananya koordinasi dalam daerah dan peninjauan lapangan	Kecamatan Se Kab. Enrekang	12 Bulan	80,925	APBD		12 Bulan	89.000
<b>132</b>	penyediaan bahan bakar minyak mesin/kendaraan operasiona kantor	tersedianya bahan bakar minyak untuk keperluan kendaraan operasional	Kabupaten	12 Bulan	45,000	APBD		12 Bulan	49,500
<b>133</b>	penyediaan peralatan kebersihan dan perlengkapan dapur kantor	tersedianya peralatan kebersihan dan perlengkapan dapur kantor	Kabupaten	12 bulan	75,000	APBD		12 bulan	82,500
<b>134</b>	peningkatan pelayanan mess pemda di jakarta	meningkatnya pelayanan mess pemda di Jakarta	Jakarta	12 bulan	80,000	APBD		12 bulan	88,000



135	penataan halaman dan penataan lapangan upacara	terlaksananya penataan halaman kantor bupati yang baik	Kabupaten	1 Unit	33,500	APBD		1 Unit	36,850
136	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan baik buku,koran,majalah,bull etin,dan media cetak lainnya	Kabupaten	30 Media	281,760	APBD		30 Media	309.900
137	Pelaksanaan pelayanan keprotokolan pemda	Terpenuhinya pelayanan keprotokolan pemerintah daerah dan masyarakat yang beretika	Kabupaten	100%	60,600	APBD		100%	66,600
138	Pengelolaan Adm. Keuangan	Terwujudnya Pengelolaan Administrasi Keuangan dan Perkantoran efektif	Kabupaten	100%	950.840	APBD		100%	1.045,900
139	Pelaksanaan Verifikasi Keuangan	Terlaksananya verifikasi SPJ keuangan setda	Kabupaten	12 Bulan	43,930	APBD		12 Bulan	48.323
140	Penyusunan Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan	Tersedianya laporan realisasi fisik dan keuangan kegiatan pembangunan	Kabupaten	41 Exp	20,350	APBD		41 Exp	22.200
141	Pelaksanaan pelelangan/pengadaan barang dan jasa	Terlaksananya pelelanganadaan barang dan jasa dan peng	Kabupaten	100 %	20.000	APBD		100 %	22.000
<b>XXXI</b>	<b>Program Peningkatan Sarana dan prasarana Aparatur</b>	<b>Terwujudnya sarana dan prasarana aparatur yang memadai</b>		<b>90%</b>	<b>1,887,062</b>	APBD		<b>90%</b>	<b>2,001,678</b>
142	pengadaan kendaraan dinas / operasional	Jumlah kendaraan operasional yang	Kabupaten	17 Unit	2.490.000	<b>APBD</b>		17 Unit	2.739.000

		diadakan							
<b>143</b>	Pengadaan peralatan Gedung kantor	Jumlah peralatan kantor yang diadakan	Kabupaten	95 %	583.526	<b>APBD</b>		95 %	641.876
<b>144</b>	Pengadaan Sarana dan Prasarana Aparatur	terlaksananya pengadaan sarana dan parasarana aparatur	Kabupaten	95 %	404,172	<b>APBD</b>		95 %	424,172
<b>145</b>	pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan	Terpeliharanya rumah jabatan Bupati, Wakil Bupati dan Sekda	Kabupaten	95 %	317,493	<b>APBD</b>		95 %	317,493
<b>146</b>	pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas	terpeliharanya rumah dinas mess pemda	Kabupaten	95 %	35,000	<b>APBD</b>		95 %	38.500
<b>147</b>	pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	terpeliharanya gedung kantor Bupati Enrekang	Kabupaten	95 %	85,534	<b>APBD</b>		95 %	94.000
<b>148</b>	pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	terpeliharanya kendaraan dinas Bupati, Wakil Bupati dan Sekda	Kabupaten	95 %	478,250	<b>APBD</b>		95 %	526.000
<b>149</b>	pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan rumah jabatan/dinas	terpeliharanya perlengkapan rumah jabatan Bupati, Wakil Bupati dan Sekda	Kabupaten	95 %	128,800	<b>APBD</b>		95 %	141.680
<b>150</b>	pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Terpeliharanya peralatan gedung kantor	Kabupaten	95 %	95,000	<b>APBD</b>		95 %	104.500
<b>151</b>	pemeliharaan rutin/berkala peralatan studio dan komunikasi	terpeliharanya alat-alat studio dan komunikasi	Kabupaten	95 %	38,600	<b>APBD</b>		95 %	41.800
<b>152</b>	pengadaan perlengkapan / peralatan rumah jabatan bupati	terlaksananya pengadaan perlengkapan / peralatan rumah jabatan bupati	Kabupaten	95 %	245,754	<b>APBD</b>		95 %	270.300

153	pengadaan perlengkapan / peralatan rumah jabatan wakil bupati	terlaksananya pengadaan perlengkapan / peralatan rumah jabatan wakil bupati	Kabupaten	95 %	95,020	<b>APBD</b>		95 %	104.522
154	pengadaan perlengkapan / peralatan rumah jabatan sekda	terlaksananya pengadaan perlengkapan / peralatan rumah jabatan sekda	Kabupaten	95 %	75.000	<b>APBD</b>		95 %	82.500
<b>XXXII</b>	<b>Program Peningkatan Disiplin Aparatur Pemda</b>	<b>Meningkatnya kedisiplinan Aparatur Pemda</b>		<b>85%</b>	<b>318,788</b>	<b>APBD</b>		<b>85%</b>	<b>350,667</b>
155	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Meningkatnya ketaatan dalam berpakaian dinas	Kabupaten	100 %	292,500	<b>APBD</b>		100 %	321.750
156	Koordinasi Penegakan Disiplin Aparatur	Meningkatnya koordinasi terhadap pelaksanaan penegakan disiplin aparatur	Kabupaten	1 Paket	45,000	<b>APBD</b>		1 Paket	49.500
157	Sosialisasi Peraturan tentang Disiplin PNS	Meningkatnya pengetahuan aparatur terhadap Peraturan Kedisiplinan	Kabupaten	1 Kali	51.000	<b>APBD</b>		1 Kali	56,100
158	Pengadaan sarana absensi Elektronik	Meningkatnya kedisiplinan aparatur terhadap jam kerja pegawai	Kabupaten	10 Unit	85.000	<b>APBD</b>		10 Unit	93.500
159	Sosialisasi Peraturan tentang pengelolaan barang milik daerah	Terlaksananya sosialisasi pengelolaan barang milik daerah	Kabupaten	1 Kali	75.000	<b>APBD</b>		1 Kali	82.500
<b>XXXII I</b>	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Meningkatnya kapasitas jumlah PNS yang mengikuti Diklat teknis	Kabupaten	33 Orang	898,830	<b>APBD</b>		33 Orang	1.052,218

		setiap tahun							
<b>160</b>	Diklat Tehnis Tugas dan fungsi bagi PNS	Jumlah PNS yang mengikuti Diklat teknis setiap tahun	Kabupaten	100 %	600,000	<b>APBD</b>		100 %	660,000
<b>161</b>	Pemberian penghargaan bagi PNS berprestasi	Terpilihnya aparatur yang berprestasi	Kabupaten	3 Orang	24,200	<b>APBD</b>		3 Orang	26,620
<b>162</b>	Diklat keprotokolan	Tersedianya tenaga keprotokolan setiap SKPD	Kabupaten, Provinsi dan Pusat	100 %	35.000	<b>APBD</b>		100 %	38.500
<b>163</b>	Sosialisasi paket regulasi tentang pengelolaan keuangan daerah	Terwujudnya pemahaman tentang regulasi pengelolaan keuangan	Kabupaten	1 Kali	35.000	<b>APBD</b>		1 Kali	38.500
<b>164</b>	Bintek implementasi paket regulasi tentang pengelolaan keuangan daerah	Terwujudnya implementasi paket regulasi tentang pengelolaan keuangan daerah	Kabupaten	150 orang	109,800	<b>APBD</b>		150 orang	120.450
<b>165</b>	Peningkatan Sumber daya melalui kegiatan promosi dan investasi pembangunan	Meningkatnya wawasan dan pengetahuan aparatur yang mengikuti kegiatan promosi pembangunan setiap tahun	Kabupaten	7 Orang	41,880	<b>APBD</b>		7 Orang	43,848
<b>166</b>	Pembinaan tenaga teknis pelaksanaan pembangunan	Meningkatnya kompetensi PPK, PPTK dan Pengawas lapangan	Kabupaten	43 SKPD	434.848	<b>APBD</b>		43 SKPD	48.232
<b>167</b>	Diklat dan sosialisasi pengadaan barang dan jasa	Meningkatnya jumlah PNS yang memiliki sertifikat pengadavan barang dan jasa	Kabupaten	140 Orang	54,810	<b>APBD</b>		140 Orang	59,850

168	Bintek pengelolaan keuangan daerah dan barang milik daerah	Terwujudnya aparatur yang terampil dalam pengelolaan Barang Daerah	Kabupaten	150 Orang	190,000	APBD		150 Orang	209.000
169	Peningkatan sumber daya melalui kegiatan promosi dan investasi pembangunan	Meningkatnya wawasan dan pengetahuan aparatur yang mengikuti kegiatan promosi pembangunan setiap tahun	Kabupaten	1 Paket	97.000	APBD		1 Paket	106.700
170	Bintek Penyusunan laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Terwujudnya aparatur yang terampil dalam menyusun LPPD	Kabupaten	120 Orang	70.000	APBD		120 Org	77.000
171	Pengembangan kapasitas Aparatur dan Tim Pembakuan Nama Unsur Rupabumi	Terlaksananya peningkatan kapasitas Aparatur dan Tim Pembakuan Nama Unrus Rupabumi di Kab. Enrekang	Kabupaten	2 Orang	40.000	APBD		2 Orang	44.000
<b>XXXI V</b>	<b>Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan</b>	<b>Terwujudnya laporan capaian kinerja pemerintah dan keuangan</b>		<b>95%</b>	<b>19,297</b>	<b>APBD</b>		<b>95%</b>	<b>21,092</b>
172	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersedianyan laporan capaian kinerja Setda	Kabupaten	100 %	17.000	APBD		100 %	18.700
173	Penyusunan Laporan Keuangan bulanan, Triwulan dan Semesteran	Terlaksananya penyusunan laporan keuangan bulanan, triwulan dan semesteran dan akhir tahun	Kabupaten	1 Paket	15.000	APBD		1 Paket	16.500

<b>XXXV</b>	<b>Program sinkronisasi perencanaan dan penganggaran SKPD</b>	<b>Terwujudnya sinkronisasi antara perencanaan daerah dengan perencanaan SKPD</b>		<b>70%</b>	<b>38,329</b>	<b>APBD</b>		<b>70%</b>	<b>41,763</b>
<b>174</b>	Penyusunan RKA-SKPD	Terlaksananya Penyusunan RKA Setda	Kabupaten	1 Kali	15.000	APBD		1 Kali	16.500
<b>175</b>	Penyusunan DPA-SKPD	Terlaksananya Penyusunan DPA SKPD	Kabupaten	1 Kali	17,000	APBD		1 Kali	18.700
<b>176</b>	Penyusunan Rencana Kerja SKPD	Terwujudnya dokumen perencanaan kerja SKPD	Kabupaten	1 Kali	20.000	APBD		1 Kali	22.000
<b>177</b>	Penyusunan Renstra	Terlaksananya penyusunan Renstra	Kabupaten	1 Kali	50.000	APBD		1 Kali	0
	<b>JUMLAH</b>				<b>23.009.000</b>				<b>25.309.900</b>

**BAB IV**  
**PENUTUP**

Rencana Kerja (Renja) merupakan kunci keberhasilan dalam pencapaian tugas pokok, fungsi dan tugas Sekretariat Daerah dalam membantu Bupati menyusun kebijakan dan mengkoordinir dinas daerah, lembaga teknis daerah dalam melaksanakan tugas sesuai petunjuk peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penyusunan rencana kerja Sekretariat Daerah diharapkan dapat menjadi pedoman dalam menyusun kebijakan yang wajar, efisien, efektif dan berkualitas sehingga dapat meningkatkan kinerja dinas daerah dan lembaga teknis daerah dalam memajukan daerah berdasarkan potensi dan peranannya. Renja Sekretariat Daerah ini disusun atas dasar visi yang diupayakan lebih realistis dengan memperhatikan potensi dan peluang yang dimiliki, permasalahan dan tantangan yang sebagai penjabaran dari dokumen Renstra Sekretariat Daerah Tahun 2014-2018.

Tetapi disadari bahwa, dokumen perencanaan yang telah disusun sebaik apapun tidak akan dirasakan manfaatnya bila tidak diimplementasikan dengan baik pula. Oleh karenanya dibutuhkan dukungan penuh berbagai pihak yang terkait, baik segenap personil Sekretariat Daerah Kabupaten Enrekang maupun semua stakeholders.

Enrekang,

BUPATI ENREKANG

MUSLIMIN BANDO